

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buduran Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Buduran.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buduran Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buduran Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Buduran tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparatur pemerintah Kecamatan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buduran Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Buduran, Pebruari 2022

Plt. CAMAT BUDURAN



WAHYU HIDAYAT, S.STP.

Pembina (IV/a)

NIP. 198004201998101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I : PENDAHULUAN	9
1.1. Latar belakang	9
a) Dasar Hukum	9
b) Tujuan Penyusunan	11
1.2. Gambaran Umum OPD	11
a) Struktur Organisasi	11
b) Tugas Pokok dan Fungsi	12
1.3. Aspek Strategis OPD	17
a) Sumber Daya Aparatur	17
b) Aset Yang Dimiliki	19
c) Isu Strategis Yang Dihadapi	20
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Perencanaan Strategis	22
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	26
2.3. Perjanjian Kinerja	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	34
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	36
a) Pengukuran Kinerja Jangka Menengah	36
b) Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah	37
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	37
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	39
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Jangka menengah	41
iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi Sejenis	42
v. Evaluasi dan Analisis Kinerja	44
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	44
- Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang	45
c) Pengukuran Kinerja Tahunan	46
d) Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan	48
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	48
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	50
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Jangka Menengah	51
iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi Sejenis	53

v. Evaluasi dan Analisis Kinerja	57
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	57
- Solusi dan Upaya Perbaikan di tahun mendatang	60
3.3. Analisis Pencapaian Program Pendukung	61
3.4. Laporan Realisasi Anggaran	63
3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	64
3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
a. Efektivitas dan Efisiensi	65
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	66
BAB IV : PENUTUP / SIMPULAN UMUM	68
LAMPIRAN : Penghargaan yang diperoleh (jika ada)	
PERNYATAAN TELAH DI REVIEW OLEH INSPEKTORAT	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran berdasarkan Jenis Kelamin	17
Tabel 1.2	Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran berdasarkan Kedudukan Jabatan	17
Tabel 1.3	Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran berdasarkan Diklat Pendidikan	18
Tabel 1.4	Pejabat Struktural dan Staf serta kelompok jabatan Fungsional pada Kecamatan Buduran	18
Tabel 1.5	Kriteria Penentuan Isu Strategis	20
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2021	22
Tabel 2.2	Matriks Rencana Strategis Tahun 2016-2021	24
Tabel 2.3	Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Tahun 2021	26
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2021	29
Tabel 2.5	Jumlah Anggaran Tahun 2021	29
Tabel 2.6	Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021	29
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	34
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Jangka Menengah/Tujuan	36
Tabel 3.3	Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Target	37
Tabel 3.4	Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	39
Tabel 3.5	Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	41
Tabel 3.6	Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan instansi sejenis	42
Tabel 3.7	Evaluasi dan Analisis Kinerja	44
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Tahunan	46
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Tahun 2021	48
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021	50
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Tahun 2021	51
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja dengan instansi sejenis	53
Tabel 3.13	Perkembangan Capaian Kinerja SKM dari Tahun 2018 sampai dengan 2021	55
Tabel 3.14	Perkembangan Pelayanan IMB Kecamatan Buduran dari Tahun 2016 sampai dengan 2021	55
Tabel 3.15	Jumlah penduduk yang mengurus KTP dari Tahun 2016 sampai dengan 2021	56
Tabel 3.16	Perkembangan penduduk yang mengurus KK dari Tahun 2016 sampai dengan 2021	57
Tabel 3.17	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	58
Tabel 3.18	Prosentase Capaian dan Kategori Capaian	58
Tabel 3.19	Perbandingan IDM Tahun Dasar (2016) dan Pencapaian tahun 2021	59
Tabel 3.20	Pencapaian Program Pendukung	61
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran	63
Tabel 3.22	Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan	64
Tabel 3.23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun 2021	44
Grafik 3.1.2	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya	44
Grafik 3.1.3	Presentase Desa Maju di Kecamatan Buduran Tahun 2021	44
Grafik 3.2.1	Nilai SKM Kecamatan Buduran Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target tahun 2021	45
Grafik 3.2.2	Nilai SAKIP Kecamatan Buduran tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Tahun 2021	46
Grafik 3.2.3	Nilai Rata Rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran Tahun 2021 dibandingkan Target Tahun 2021	46
Grafik 3.3.1	Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) antara Capaian Kinerja dengan Target	48
Grafik 3.3.2	Pendelegasian Urusan Pemerintahan Lainnya yang di Delegasikan ke Kecamatan	48
Grafik 3.3.3	Perbandingan Persentase Desa Maju antar Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2021	48
Grafik 3.4.1	Perbandingan realisasi Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Tahun 2021	49
Grafik 3.4.2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang di Delegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan dengan Baik	50
Grafik 3.4.3	Perbandingan Realisasi Persentase Desa Maju dengan Tahun 2020	50
Grafik 3.5.1	Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	51
Grafik 3.5.2	Perbandingan Persentase Desa Maju antara Capaian Kinerja dengan Target jangka Menengah	52
Grafik 3.6.1	Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	53
Grafik 3.6.2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang di Delegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan dengan Baik	53
Grafik 3.6.3	Presentase Desa Maju di Kecamatan	53
Grafik 3.7.1	Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Instansi Sejenis	54
Grafik 3.7.2	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan dengan Baik	55
Grafik 3.7.3	Presentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	55
Grafik 3.8.1	Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	56
Grafik 3.8.2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang di Delegasikan ke Kecamatan Buduran	57
Grafik 3.8.3	Persentase Desa maju di Kecamatan Buduran	57
Grafik 3.9.1	Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	58
Grafik 3.9.2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang di Delegasikan ke Kecamatan Buduran dengan Baik	59
Grafik 3.9.3	Capaian Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	59

Grafik 3.10.1	Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	60
Grafik 3.10.2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang di Delegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan dengan Baik	61
Grafik 3.10.3	Capaian Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	61
Grafik 3.11	Perkembangan Capaian Kinerja (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ SKM) Kecamatan Buduran Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	62
Grafik 3.12	Perkembangan Pelayanan IMB Rumah Tinggal Dibawah 400 ² M Kecamatan Buduran Tahun 2017 - 2021	62
Grafik 3.13	Jumlah Penduduk yang Mengurus kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021	63
Grafik 3.14	Jumlah Keluarga yang Mengurus Kartu Keluarga (KK) Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021	63
Grafik 3.15.1	Perbandingan Nilai SKM Kecamatan	64
Grafik 3.15.2	Nilai Rata – rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran	65
Grafik 3.15.3	Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	65
Grafik 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Buduran	65
Grafik 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja SKM Kecamatan Buduran Dengan Instansi Sejenis	66

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan [PERMENPAN No. 53 Tahun 2014](#), Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Buduran Tahun 2021, disampaikan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	% Capaian Tahun 2021	Kategori
1	Tujuan 1 : Meningkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan Target Tahun 2021 : 82,80	110,05%	Sangat Berhasil
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran dengan Target Tahun 2021 : A (80)	1. 97,84%	Berhasil
		2. Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran dengan Target Tahun 2021 : 0,8689	2. 99,75%	Berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Tahun 2021	Kategori
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan Target Tahun 2021 : 82,80	110,05%	Sangat Berhasil
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik dengan Target Tahun 2021 : 100%	1. 100%	Berhasil

		2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran dengan Target Tahun 2021 : 90%	2. 96,30%	Berhasil
--	--	---	-----------	----------

KETERANGAN :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2.	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3.	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4.	Kurang dari 75%	Kurang

Sehingga dari 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja pada Tahun 2021 rata – rata Capaian kinerja mencapai mencapai diatas 90 % atau kategori **Berhasil**. Bahkan ada satu indikator yang Capaian Kinerjanya melebihi 100% yaitu Nilai SKM masuk kategori **Sangat Berhasil**.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan serta indikator sasaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 (dua) Tujuan dengan 3 (tiga) indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan Target Tahun 2021 : 82,80	Sangat Berhasil
2.	A. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran dengan Target Tahun 2021 : A	Berhasil
	B. Nilai IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran dengan Target Tahun 2021 : 0,8689	Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan Target Tahun 2021 : 82,80	Sangat Berhasil
2.	A. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik dengan Target Tahun 2021 : 100%	Berhasil
	B. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran dengan Target Tahun 2021 : 90%	Berhasil

Sehingga dari 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran serta 3 (tiga) Indikator Kinerja pada Tahun 2021 rata – rata realisasi kinerja mencapai lebih dari 90% atau kategori Berhasil. Bahkan ada 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai SKM mencapai lebih dari 100%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

a) Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buduran Kabupaten Buduran disusun berdasarkan landasan hukum dan memberikan aspek legal. Berikut ini merupakan landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2010 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat ;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

b) Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buduran adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Gambaran Umum OPD

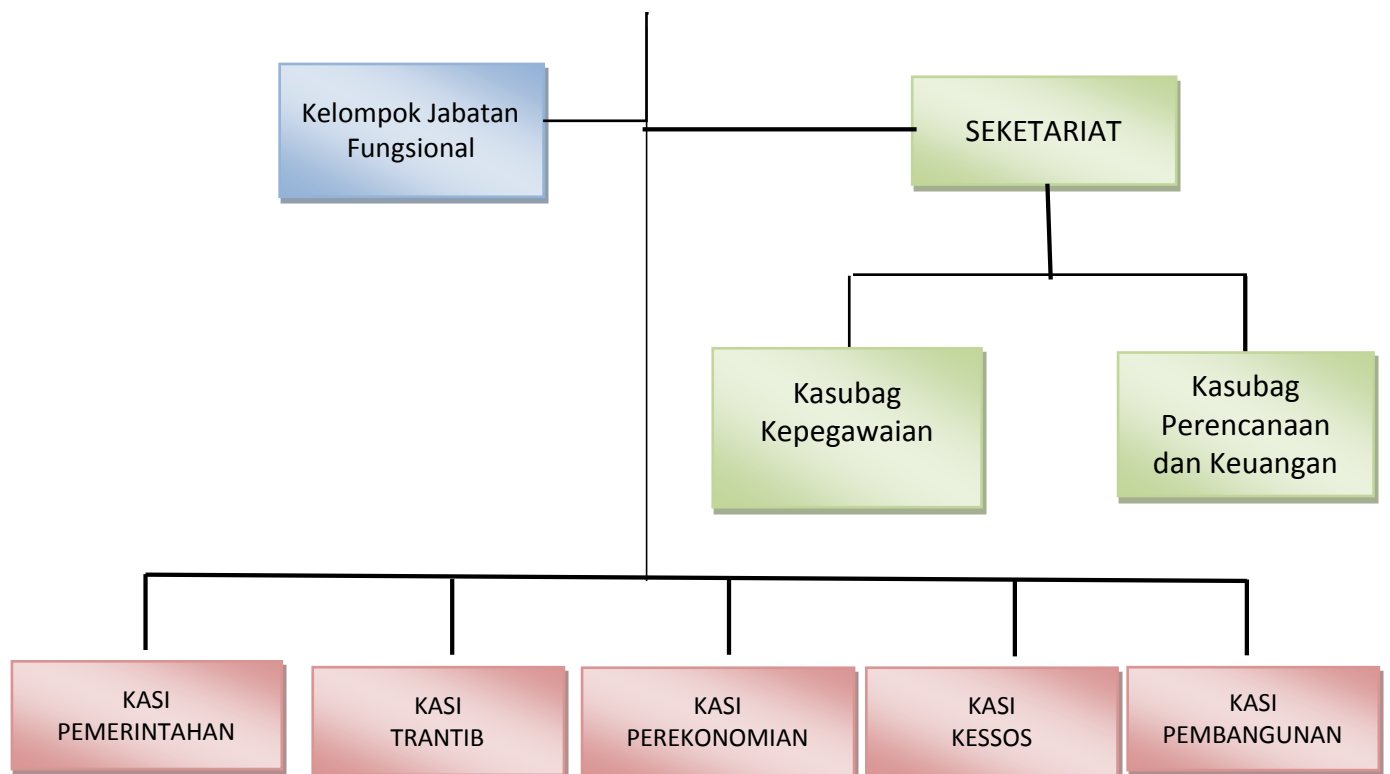
a) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Buduran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan Lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016, sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari Sekretaris dan 2 Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi – Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 3. Seksi Perekonomian ;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 5. Seksi Pembangunan.

CAMAT



Struktur Organisasi Kecamatan Buduran

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Pembagian Tugas dan Fungsi dalam struktur tersebut, yaitu :

1. Camat

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ;
- mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan ;
- menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan ;
- melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan ;

- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Bahwa :

- (1) Camat disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat ;
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan pada bidang :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. Perhubungan ;
- e. Tenaga Kerja ;
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- h. Perindustrian ;
- i. Perdagangan ;
- j. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ;
- k. Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas Camat berwenang menandatangani :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya ;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) ;
- c. legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan ;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V) ;
- e. rekomendasi penutupan / penggunaan jalan local / desa ;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro ;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro ;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Disamping menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi urusan pemerintahan pada bidang :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- d. Perhubungan ;
- e. Tenaga Kerja ;
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- h. Perindustrian ;
- i. Perdagangan ;
- j. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;

- k. Lingkungan Hidup ;
- l. Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- m. Sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan serta pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi ;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan ;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi ;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor ;
- c. Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat ;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program ;
- b. Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai ;
- c. Menyiapkan rencana kebutuhan anggaran ;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan ;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi :
 1. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
 2. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa ;
 3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :
 1. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
 2. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ;
 3. pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/reklame liar) ;
 4. penanganan konflik social ;
- c. Memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan. Penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi :

1. Pembinaan penanganan sampah domestik ;
 2. Pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro ;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi).
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan ;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan ;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi :
 1. Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan ;
 2. Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian ;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi :
 1. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat ;
 2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro ;

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian ;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3. Aspek Strategis OPD

Sumber daya pada sebuah organisasi dapat dilihat kedalam dua sisi, yaitu sisi sumber daya manusia dan sumber daya fisik atau biasa dikenal dengan istilah sarana prasarana. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan. Komposisi yang pas, optimalisasi penempatan aktor pelaksana serta efektivitas struktur yang proporsional mampu menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Jumlah Personalia dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah akan mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Buduran. Jumlah personalia di Kecamatan Buduran dengan rincian sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur

Tabel 1.1 Komposisi Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	12	55
2.	Perempuan	10	45
	Jumlah	22	100

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 22 orang yang terdiri dari 12 orang berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan table 1.1 menunjukkan bahwa kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh staf yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12 orang.

Tabel 1.2 Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran berdasarkan Kedudukan Jabatan

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Eselon IIIa	1	14
2.	Eselon IIIb	-	-
3.	Eselon IVa	4	57
4.	Eselon IVb	2	29
	Jumlah	7	100

Berdasarkan pada table 1.2 diatas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kedudukan jabatan didukung oleh 7 orang yang terdiri dari Eselon IIIa sebanyak 1 orang, Eselon IIIb sebanyak 0 orang, eselon IVa sebanyak 4 orang, eselon IVb sebanyak 2 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Buduran didominasi oleh Eselon IVa sebanyak 4 orang.

Tabel 1.3 Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Buduran berdasarkan Diklat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	3	14
2.	Strata 1	5	23
3.	Sarjana Muda	2	9
4.	SLTA	12	54
	Jumlah	22	100

Pada tabel 1.3 diatas, dapat diamati bahwa jumlah jumlah pegawai lulusan SLTA sebanyak 12 orang, pegawai lulusan sarjana muda sebanyak 2 orang, lulusan Strata 1 sebanyak 5 orang dan lulusan Strata 2 sebanyak 3 orang. Berdasarkan pada total jumlah pegawai sebanyak 22 orang lebih banyak didominasi oleh lulusan SLTA. Kemudian disusul lulusan Strata 1 pada urutan kedua tingkat pendidikan terbanyak di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mengindikasikan bahwa sumberdaya manusia di Kecamatan Buduran masih kurang baik, sebab didominasi oleh pegawai yang merupakan lulusan SLTA.

Tabel 1.4 Pejabat Struktural dan Staf serta kelompok jabatan Fungsional pada Kecamatan Buduran

No.	Uraian	Golongan								Non		JML
		IV		III		II		I		ASN		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	4	1	2	-	-	2	-	10
3	Seksi Pemerintahan	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
4	Seksi Pembangunan	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
5	Seksi Kesos	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3
6	Seksi Trantib	-	-	1	-	2	-	-	-	7	-	10
7	Seksi Perekonomian	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3
	Dinas Sektoral											
8	Mantri + PPL	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2	6
9	Mantis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Penyuluh KB	2	-	1	-	--	-	-	-	-	-	3
	J u m l a h	5		16		9		-		12		41

b. Aset Yang Dimiliki

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana prasarana yang lebih memadai dapat menunjang seluruh aktifitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu *output* atau tingkat capaian yang lebih baik. Dengan sarana prasarana menjadi bagian terpenting Kecamatan Buduran karena produk yang dihasilkan adalah berbentuk pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Buduran telah tersedia sarana dan prasarana yang telah tercantum sebagai berikut :

Bangunan/Gedung

- Kantor Camat	:	1 Unit
- Gedung Pelayanan	:	1 Unit
- Rumah Dinas	:	1 Unit
- Pendopo	:	1 Unit
- Musholla	:	1 Unit
- Dapur	:	1 Unit
- Gedung Pertemuan PKK	:	1 Unit
- Gedung Kantor Dinas/Fungsional	:	1 Unit
- Gedung Bank Jatim	:	1 Unit
- Gazebo	:	2 unit

Kendaraan Dinas

- Roda 4	:	4 Unit
- Roda 2	:	3 Unit

Mesin Kantor

- Komputer (PC)	:	17 Unit
- Camera CCTV	:	3 Unit
- Radio Komunikasi	:	2 Buah
- Laptop	:	8 Buah
- Printer	:	17 Buah
- Printer E KTP	:	3 Unit
- Printer KIA	:	1 Unit
- LCD	:	2 Unit
- Scanner	:	6 Buah
- Kamera	:	1 Buah
- Sound sistem (pengeras suara)	:	2 Set

c. Isu Strategis Yang Dihadapi

Pada Penentuan isu-isu strategis berdasarkan kinerja OPD, Tantangan dan peluang OPD, identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD, telaah-telaah berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD serta tinjauan Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal); Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya, maka berikut metode penentuan isu strategi rencana strategis Kecamatan Sidoarjo antara lain sebagai berikut :

- 1. Metode penentuan isu strategis
Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara :
 - a. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh jajaran Kecamatan Sidoarjo, Akademisi, dan *stake holder* terkait.
 - b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel.
 - 2) Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut.
 - 3) Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta.

Tabel 1.5 Kriteria Penentuan Isu Strategis

No.	Kriteria*)	Bobot**)
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Jumlah Total	100

- 2. Rumusan Isu-isu Strategis
Penentuan isu-isu strategis pembangunan wilayah kecamatan Buduran di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan potensi wilayah kecamatan, identifikasi permasalahan pembangunan dan permasalahan pelayanan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo disusun untuk pembenahan dan dipertahankan.
Berdasarkan telaah analisis permasalahan, isu strategis Kecamatan Buduran di Kabupaten Sidoarjo adalah :

- a Masih kurangnya jumlah SDM aparatur dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan ;
- b Kurang terpublikasinya Standar operasional prosedur (SOP) dan Standart Pelayanan Publik (SPP) ;
- c Belum optimalnya sarana dan prasarana beserta Anggaran penunjang kinerja ;
- d Kurangnya dukungan data sebagai database baik di kecamatan maupun di desa dalam menjawab isu-isu strategis ;
- e Masih kurangnya persentase desa mandiri.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

- a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD
- Perencanaan strategis Kecamatan Buduran memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2021

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD
<p>Misi 1 :</p> <p>Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan</p>	<p>Tujuan 1 :</p> <p>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Indeks Good Governance Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>Sasaran 2 :</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi Informasi</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</p>	<p>Tujuan 1 :</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan</p> <p>Indikator :</p> <p>Nilai SKM Kecamatan</p>	<p>Sasaran 1 :</p> <p>Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</p>
<p>Misi 2 :</p> <p>Meningkatnya Perekonomian Daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan</p>	<p>Tujuan 2 :</p> <p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini</p>	<p>Sasaran 4 :</p> <p>Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Persentase Desa Maju</p>	<p>Tujuan 2 :</p> <p>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran</p>	<p>Sasaran 2 :</p> <p>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan</p>

Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat		2. Tingkat Kemiskinan 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2. Nilai Rata – Rata IDM (Indeks Desa Memba ngun) Kecamatan Buduran	Pemerintahan Desa
--	--	---	--	----------------------

b. Matriks Rencana Strategis

Tabel 2.2 Matriks Rencana strategi Tahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan dengan Target tahun 2021 : 82,80

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	Tahun Dasar	TARGET TAHUNAN					PROGRAM PENDUKUNG
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	82,29	82,30	82,50	82,65	82,75	82,80	<i>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>

Tujuan 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Tujuan : 1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran dengan Target tahun 2021 : A

2. Nilai Rata – Rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran dengan Target tahun 2021 : 0,8689

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	Tahun Dasar	TARGET TAHUNAN					PROGRAM PENDUKUNG
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kec. Buduran Dilaksanakan Dengan Baik $\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kec. Buduran Dilaksanakan Dengan Baik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	Jumlah desa maju $\frac{\text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	53%	65%	75%	80%	90%	100%	II. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										III. PROGRAM PENYELENGGARAAN

										URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Tabel 2.3 Rencana Kerja Kecamatan Buduran Tahun 2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan dengan Target tahun 2021 : 82,80

No	Sasaran Strategis		Target 2021	Program		Target 2021	Anggaran
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82,80%	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	4.767.041.422,00

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja Tujuan : 1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran dengan Target tahun 2021 : A
2. Nilai Rata – Rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran dengan Target tahun 2021 : 0,8689

No	Sasaran Strategis		Target	Program		Target	Anggaran
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja		
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	a. 100%	II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	a. 100%	656.540.916,00
		2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	b. 100%		b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Kesos, Pembangunan Lingkungan dan Perekonomian c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data IDM secara valid d. Persentase desa yang sudah menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	b. 100% c. 100% d. 100%	
				III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang trantibum yang ditindaklanjuti b. Persentase lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang dibina c. Persentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditangani	a. 100% b. 50% c. 90%	174.026.044,00

				IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 X	9.761.207,00
				V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	66.405.159,00

2.3. Perjanjian Kinerja

(Diuraikan garis besar Perjanjian Kinerja OPD beserta rincian anggaran program)
 Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Plt. Camat Buduran dengan Bapak Bupati Sidoarjo, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Plt. Camat Buduran Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	82,80
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik 2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	100% 100%

Tabel 2.5 Jumlah Anggaran Tahun 2021

No.	Program	Pagu Anggaran Tahun 2021
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.767.041.422,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 656.540.916,00
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 174.026.044,00
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 9.761.207,00
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 66.405.159,00
	Jumlah	Rp. 5.648.774.748,00

Tabel 2.6 Anggaran per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.767.041.422,00	4.431.874.108,00	92,97
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.433.852,00	52.229.400,00	99,61

	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.797.000,00	99,59
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	727.512,00	727.400,00	99,98
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.193.100,00	1.193.000,00	99,99
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	513.240,00	512.000,00	99,76
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.087.598.425,00	2.919.713.453,00	94,56
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.059.706.644,00	2.891.825.203,00	94,51
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.690.227,00	27.686.950,00	99,99
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	201.534,00	201.300,00	99,88
1.3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	386.345,00	282.800,00	73,20
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	386.345,00	282.800,00	73,20
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.858.479,00	201.517.500,00	88,44
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.298.007,00	3.291.600,00	99,81
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.000.000,00	86.500.000,00	77,23
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.235.528,00	3.844.000,00	90,76
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.460.000,00	2.220.000,00	90,24
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	9.232.113,00	9.227.400,00	99,95
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.929.000,00	46.837.500,00	99,81
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.703.831,00	49.597.000,00	99,79
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.646.750,00	44.570.000,00	99,83
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.646.750,00	44.570.000,00	99,83

1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.255.117.591,00	1.116.387.411,00	88,95
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.196.391,00	6.180.000,00	99,74
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	118.432.186,00	87,73
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.113.921.200,00	991.775.225,00	89,03
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.000.000,00	97.173.544,00	98,16
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.000.000,00	37.926.100,00	97,25
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.247.444,00	96,99
	Jumlah	4.767.041.422,00	4.431.874.108,00	92,97
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	656.540.916,00	623.365.931,00	94,95
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.798.230,00	84.651.000,00	73,10
	Sub Kegiatan : Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	115.798.230,00	84.651.000,00	73,10
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.568.400,00	5.568.400,00	100,00
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.568.400,00	5.568.400,00	100,00
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dilimpahkan kepada Camat yang			

	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.062.786,00	7.036.900,00	99,63
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	19.992.496,00	19.890.000,00	99,49
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	508.119.004,00	506.219.631,00	99,63
	Jumlah	656.540.916,00	623.365.931,00	94,95
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	174.026.044,00	155.800.000,00	89,53
3.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	66.077.658,00	64.077.500,00	95,96
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.360.000,00	41.360.000,00	100,00
	Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.717.658,00	22.717.500,00	91,91
3.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	107.948.386,00	91.722.500,00	84,97
	Sub Kegiatan : Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	107.948.386,00	91.722.500,00	84,97
	Jumlah	174.026.044,00	155.800.000,00	89,53
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.761.207,00	9.734.900,00	99,73
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.761.207,00	9.734.900,00	99,73

	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	9.761.207,00	9.734.900,00	99,73
	Jumlah	9.761.207,00	9.734.900,00	99,73
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.405.159,00	33.715.000,00	50,77
5.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.405.159,00	33.715.000,00	50,77
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.784.273,00	1.832.500,00	65,82
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.620.886,00	31.882.500,00	50,11
	Jumlah	66.405.159,00	33.715.000,00	50,77
	TOTAL	(5.648.774.748,00)	(5.223.304.820,00)	92,75

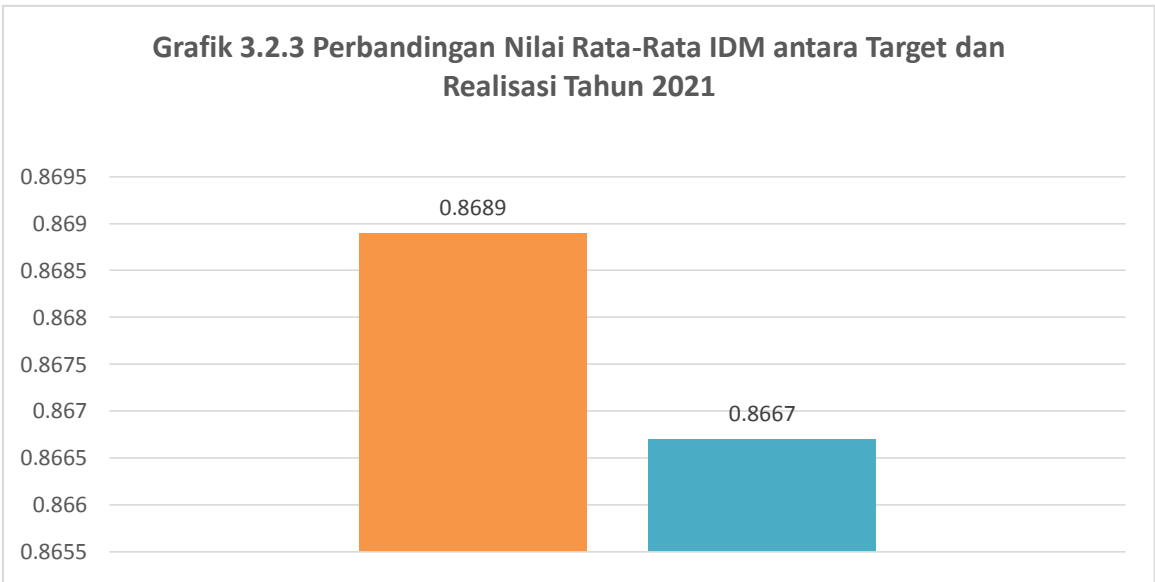
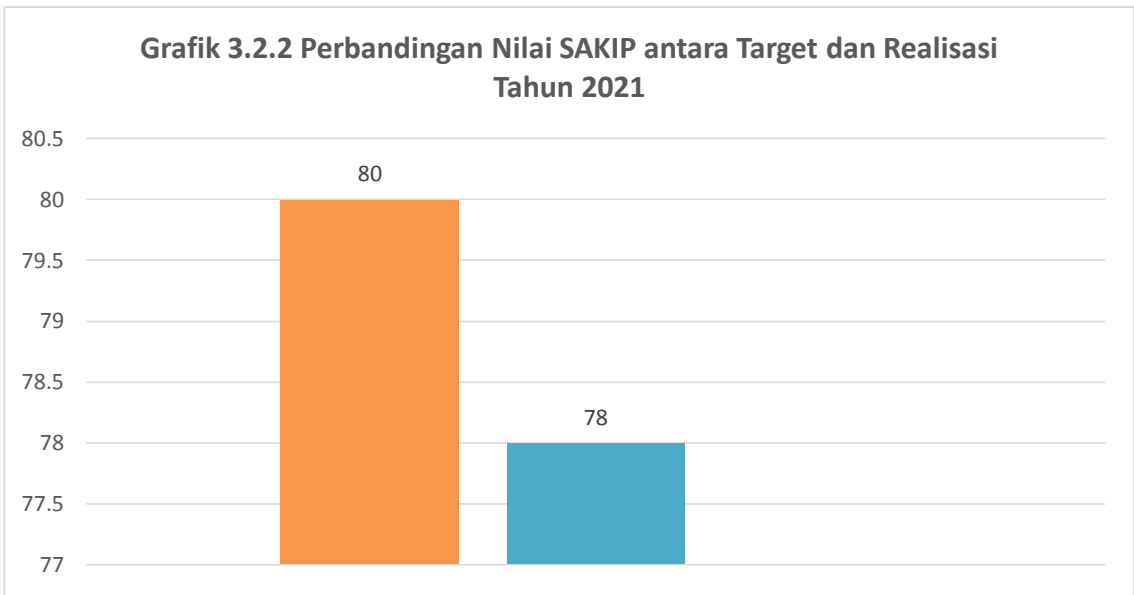
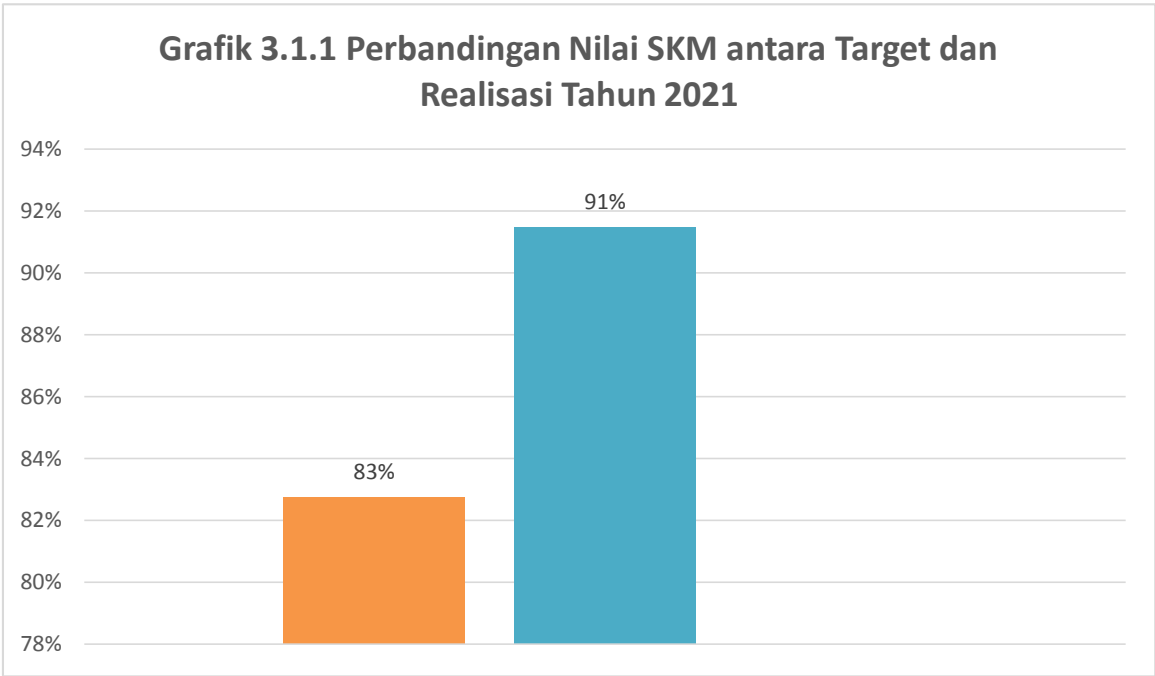
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan organisasi.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Buduran	82,80	91,12	110,05%
2	1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	80	78,27	97,84%
	2. Nilai Rata-rata Indeks Desa Maju (IDM) Kecamatan Buduran	0,8689	0,8667	99,75%



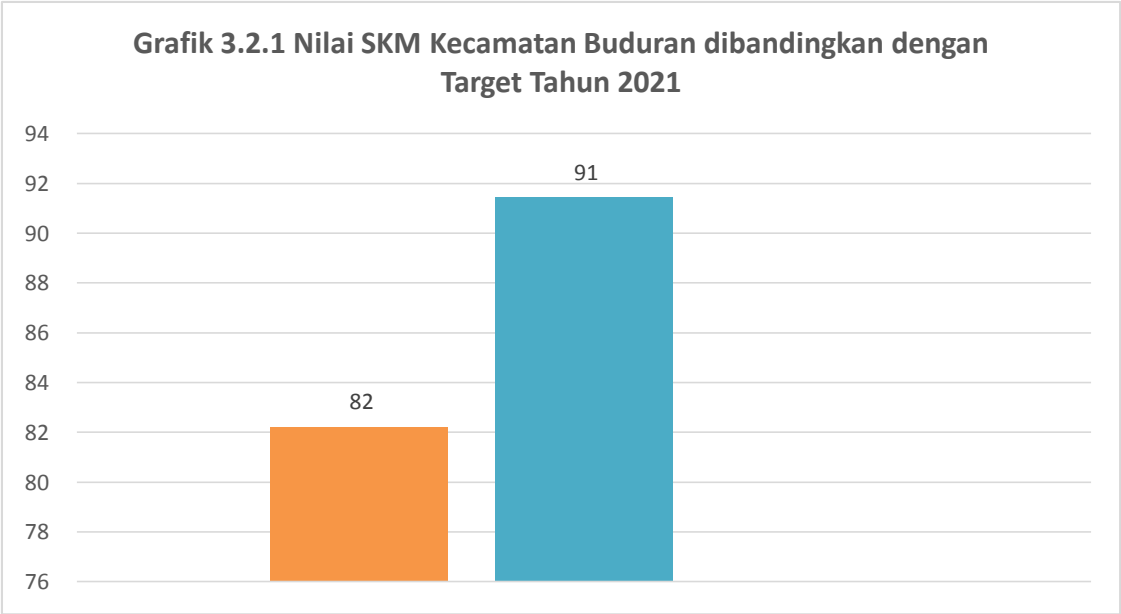
3.2 Capaian Kinerja Organisasi

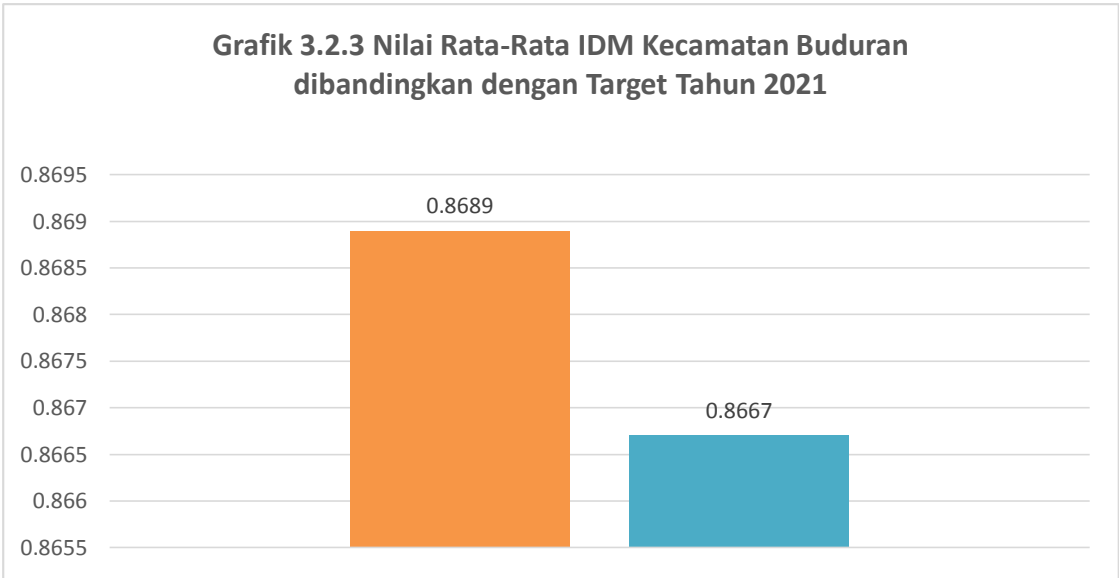
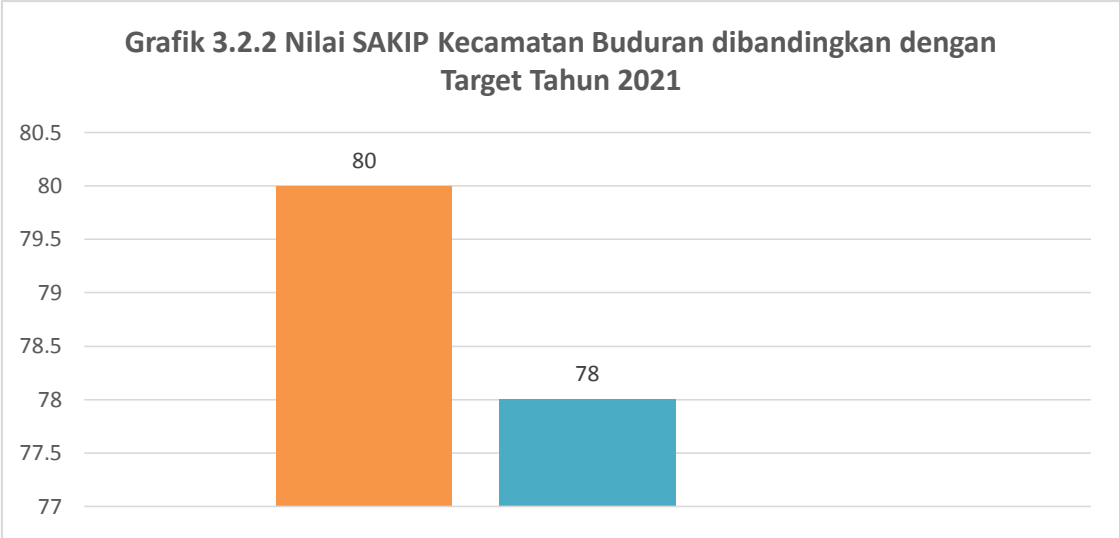
a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Pengukuran capaian kinerja jangka menengah/tujuan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tujuan di tahun 2021, dengan target dari indikator kinerja tujuan di tahun 2021, sebagaimana pada Matriks Renstra Tahun 2016-2021.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Jangka Menengah/Tujuan

No	TUJUAN	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Buduran	82,80	91,12	110,05%
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	80,00	78,27	97,84%
		2. Nilai Rata-Rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran	0,8689	0,8667	99,75%





b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

i. Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Target

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian realisasi kinerja pada tahun 2021, dengan target dari indikator kinerja tujuan pada tahun 2021, sebagaimana pada Renstra Tahun 2021.

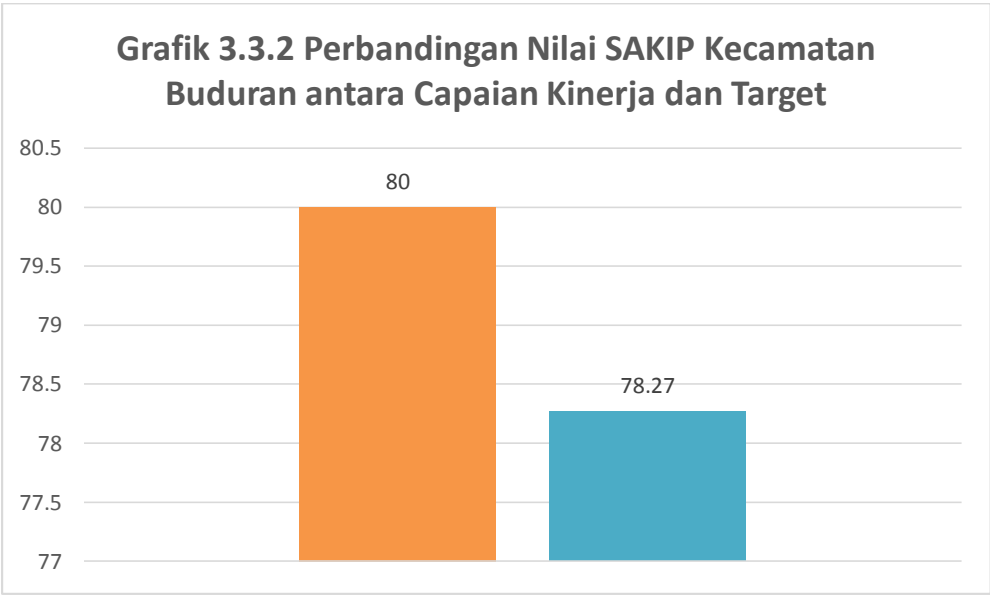
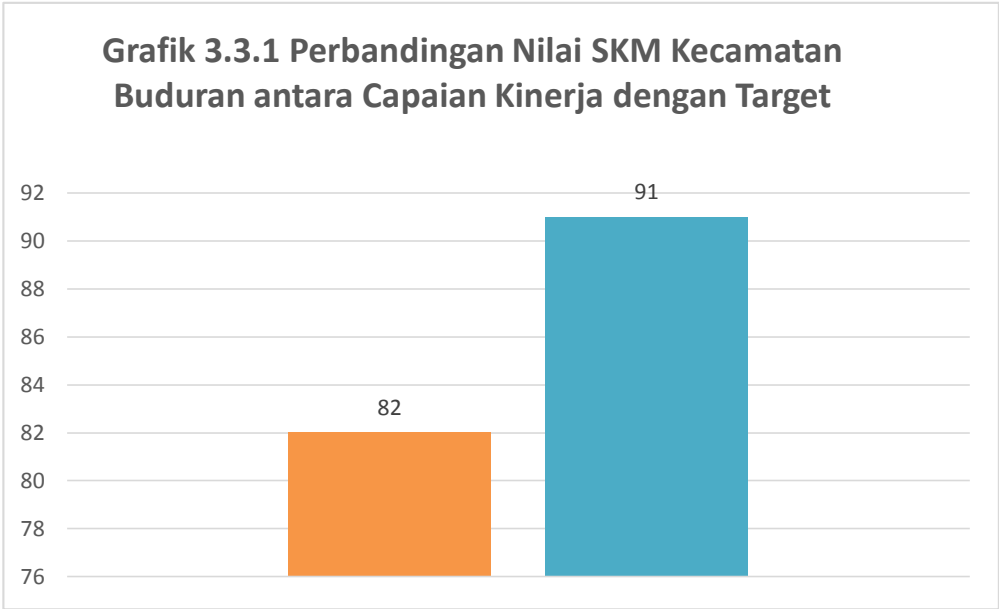
Tabel 3.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Target

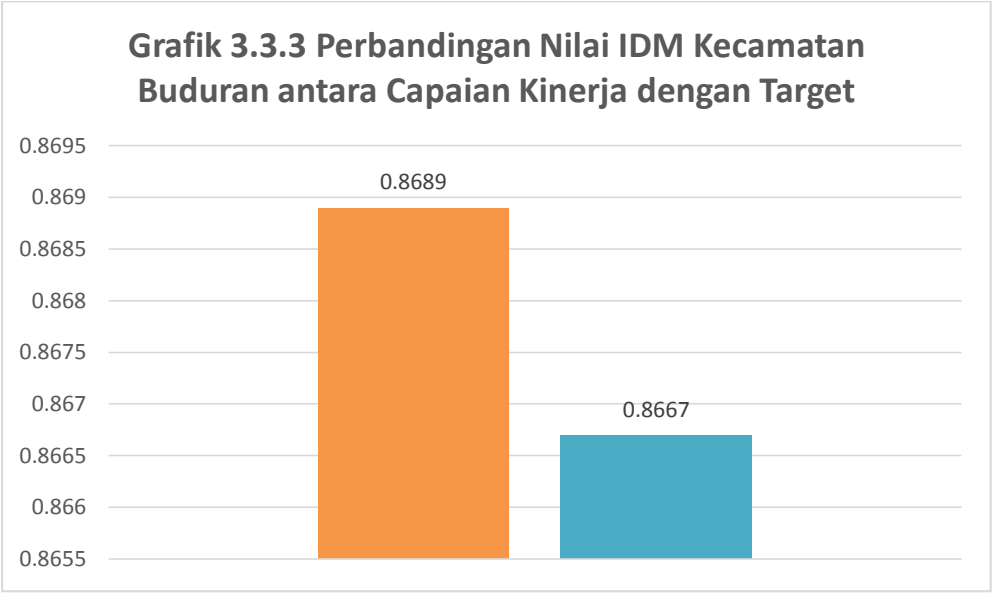
No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target s.d Tahun 2021	Realisasi s.d Tahun 2021	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai SKM Kecamatan Buduran	82,80	91,12	110,05%
2	1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	80,00	78,27	97,84%
	2. Nilai Rata-Rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran	0,8689	0,8667	99,75%

Berdasarkan tabel diatas dan grafik tersebut dibawah, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja SKM telah mencapai 110,05% melebihi dari target.

Berdasarkan tabel diatas dan grafik tersebut dibawah, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SAKIP telah mencapai 96,14% dari target.

Berdasarkan tabel diatas dan grafik tersebut dibawah, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja IDM telah mencapai 99,75% dari target.





ii. Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian realisasi kinerja pada tahun 2021 dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2020 dan capaian realisasi kinerja pada tahun 2019.

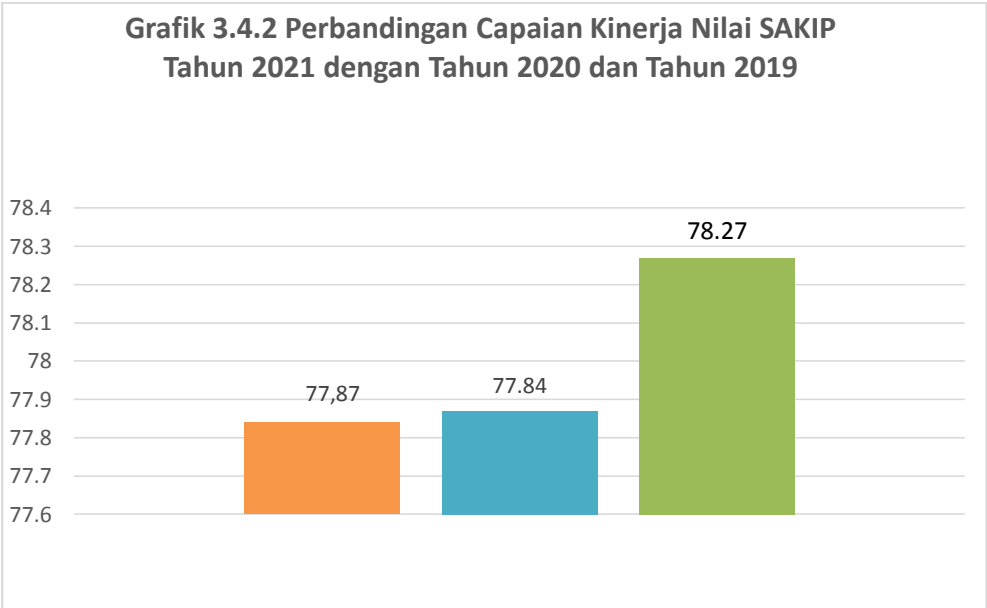
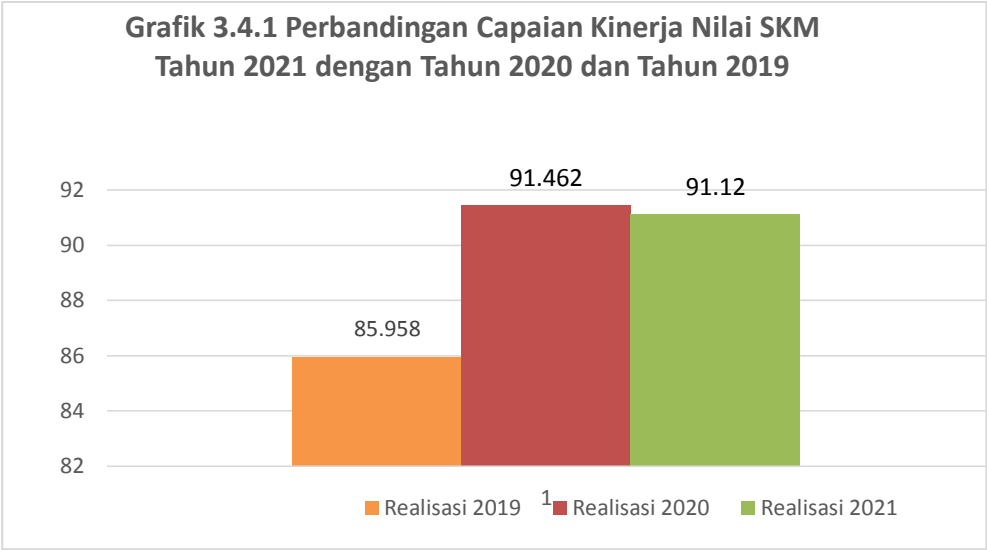
Tabel 3.4 Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1	Nilai SKM Kecamatan Buduran	85,958	91,462	91,12
2	1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	77,84	77,87	78,27
	2. Nilai Rata-Rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran	0,4000	0,7333	0,8667

Berdasarkan tabel diatas dan grafik tersebut di bawah, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SKM tahun 2021 meningkat dari tahun 2019 dengan kenaikan sebesar 85,958%. Akan tetapi mengalami penurunan dari tahun 2020, dengan penurunan sebesar 91,462%

Berdasarkan tabel diatas dan grafik tersebut di bawah, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SAKIP tahun 2021 meningkat dari tahun 2019 dengan kenaikan sebesar 77,84%. Serta meningkat dari tahun 2020, dengan kenaikan sebesar 77,87%

Berdasarkan tabel diatas dan grafik tersebut di bawah, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai Rata-rata IDM tahun 2021 meningkat dari tahun 2019 dengan kenaikan sebesar 40%. Serta meningkat dari tahun 2020, dengan kenaikan sebesar 73,33%



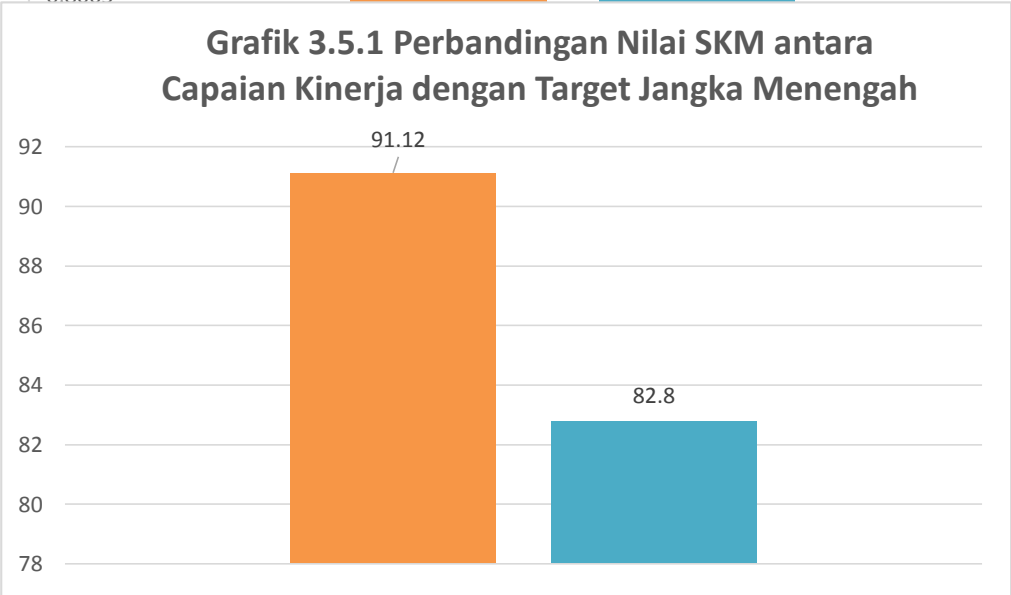
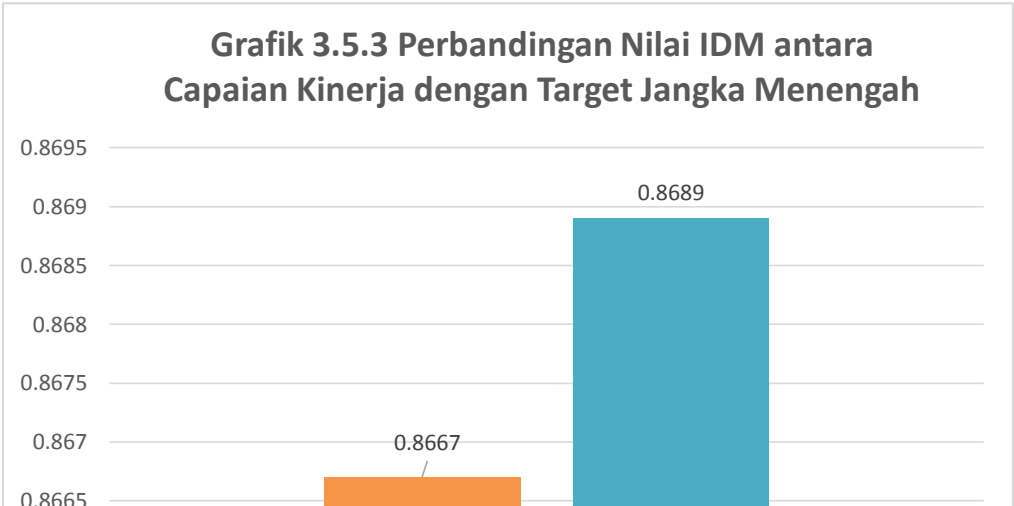
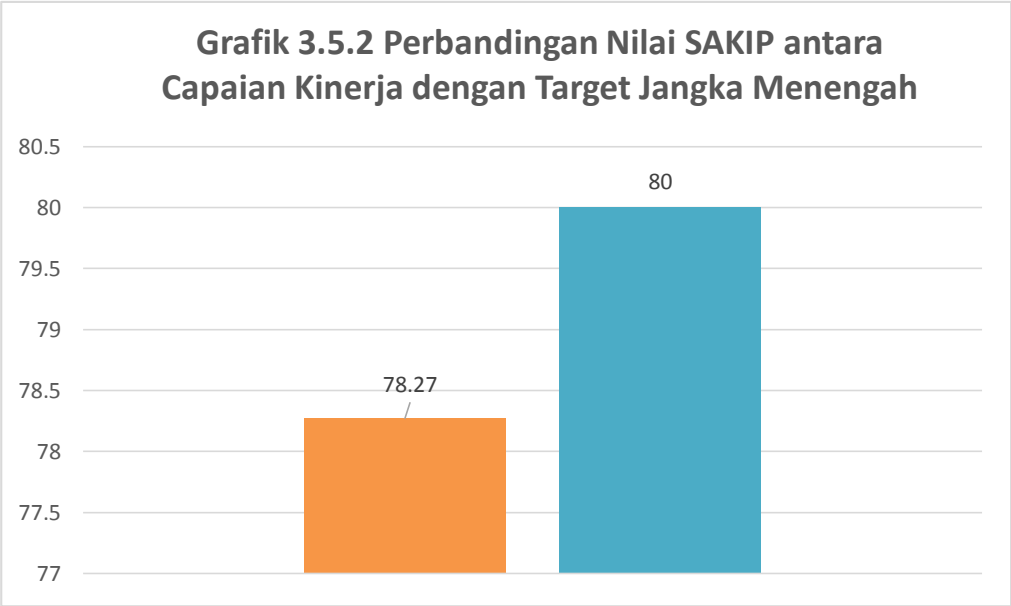
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tujuan pada tahun 2021, dengan target dari indikator kinerja tujuan pada tahun 2021, sebagaimana pada Renstra Tahun 2021.

Tabel 3.5 Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target s.d Tahun 2021	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai SKM Kecamatan Buduran	91,12	82,80	110,05%
2	1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	78,27	80,00	97,84%
	2. Nilai Rata-Rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran	0,8667	0,8689	99,75%

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SKM telah mencapai 110,05% dari target jangka menengah. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SAKIP telah mencapai 97,84% dari target jangka menengah. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai Rata-rata IDM telah mencapai 99,75% dari target jangka menengah.

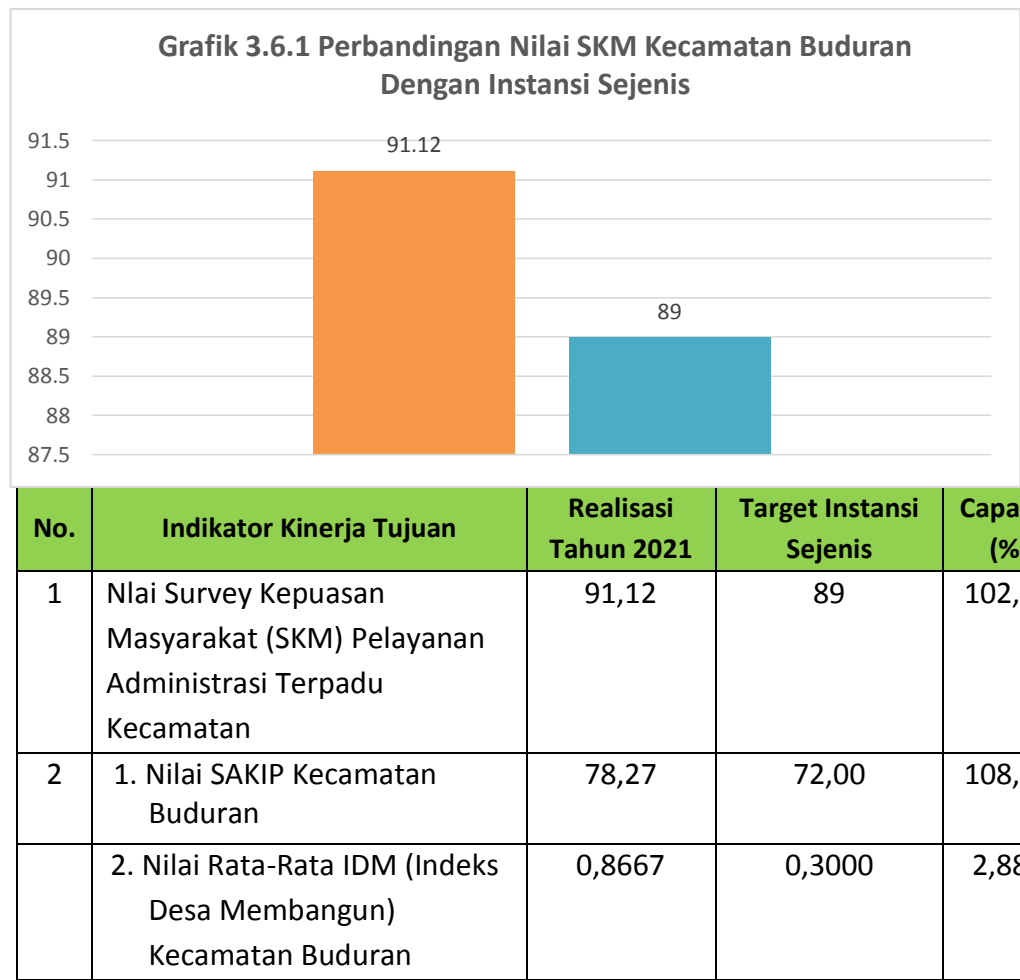


iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja pada tahun 2021, dengan target

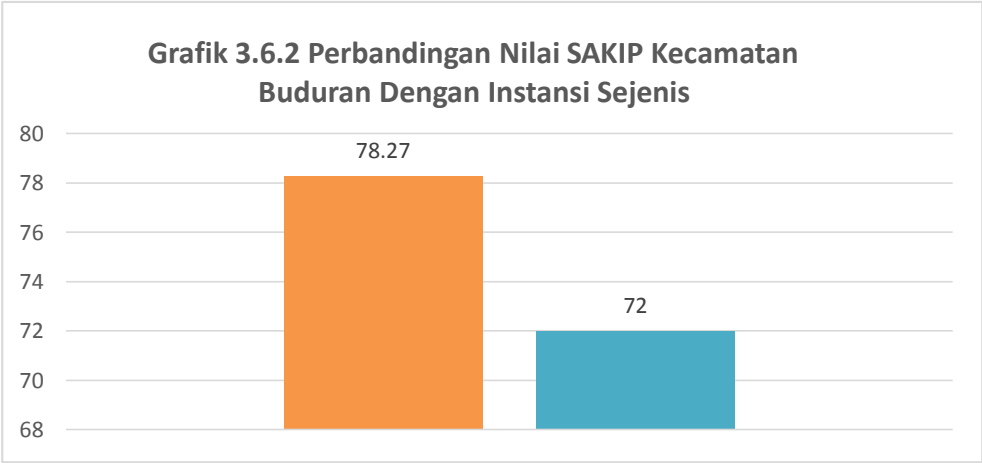
dari indikator kinerja instansi sejenis, dalam hal ini **Kecamatan Gedangan**, pada tahun 2021.

Tabel 3.6 Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan instansi sejenis (Kecamatan Gedangan)

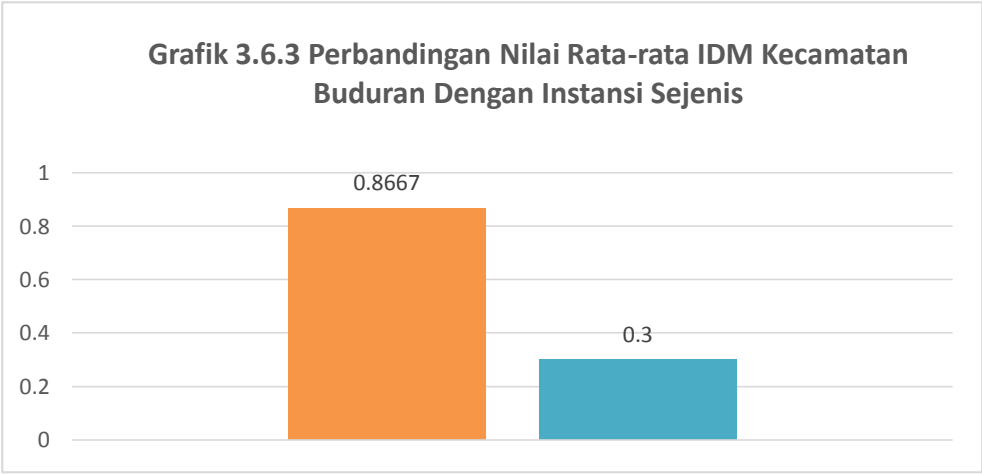


Berdasarkan tabel diatas dan grafik tersebut dibawah, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SKM, Nilai SAKIP dan Nilai Rata2 IDM apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari instansi sejenis yaitu **Kecamatan Gedangan**, maka capaian kinerja Kecamatan Buduran **lebih baik**.

v.



Evaluasi dan Analisis Kinerja



Berdasarkan hasil pencapaian tersebut, setelah setelah dilakukan pengukuran kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian kinerja, yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilan kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target setiap indikator, yang meliputi perbandingan hasil capaian kinerja, penjelasan dalam menghadapi permasalahan–permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya–upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan capaian kinerja ada yang termasuk kategori **sangat berhasil** dengan capaian sebesar 110,05% (Indikator Kinerja Nilai SKM), kategori **berhasil** dengan capaian sebesar 97,84% (Indikator Kinerja Nilai SAKIP) dan kategori **berhasil** dengan capaian sebesar 99,75% (Indikator Kinerja Nilai Rata-rata IDM).

Tabel 3.7 Evaluasi dan Analisis Kinerja

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	% Capain	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	110,05%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	97,84%	Berhasil
		2. Nilai Rata-Rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Buduran	99,75%	Berhasil

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam

menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

➤ **TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan**

- 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
 - Tidak ada.
- 2) Upaya yang telah dilakukan :
 - Mempertahankan kualitas pelayanan
- 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
 - Lebih meningkatkan kualitas pelayanan
- 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
 - Kualitas Pelayanan Kecamatan sangat baik karena capaian indikator kinerja lebih dari 100%

➤ **TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

- 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
 - Kurang optimalnya capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP, belum mencapai 100%
 - Kurang optimalnya capaian Indikator Kinerja Nilai Rata-rata IDM, belum mencapai 100%
- 2) Upaya yang telah dilakukan :
 - Lebih mengoptimalkan Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
 - Lebih mengoptimalkan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan mengutamakan pengisian data-data IDM dengan data yang akurat
- 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
 - Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan SDM yang tersedia
 - Mengupayakan penyediaan data yang akurat dan pengisian yang optimal
- 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
 - Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Kecamatan sangat berhasil, mencapai lebih dari 100%
 - Capaian Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP dan Nilai Rata-rata IDM termasuk kategori berhasil, mencapai lebih dari 90% s.d kurang dari 100%

Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

1. Mempertahankan capaian kinerja kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatkan capaian kinerja kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan meningkatkan capaian nilai SAKIP Kecamatan
3. Meningkatkan capaian kinerja kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan meningkatkan capaian nilai IDM Kecamatan

c. Pengukuran Kinerja Tahunan

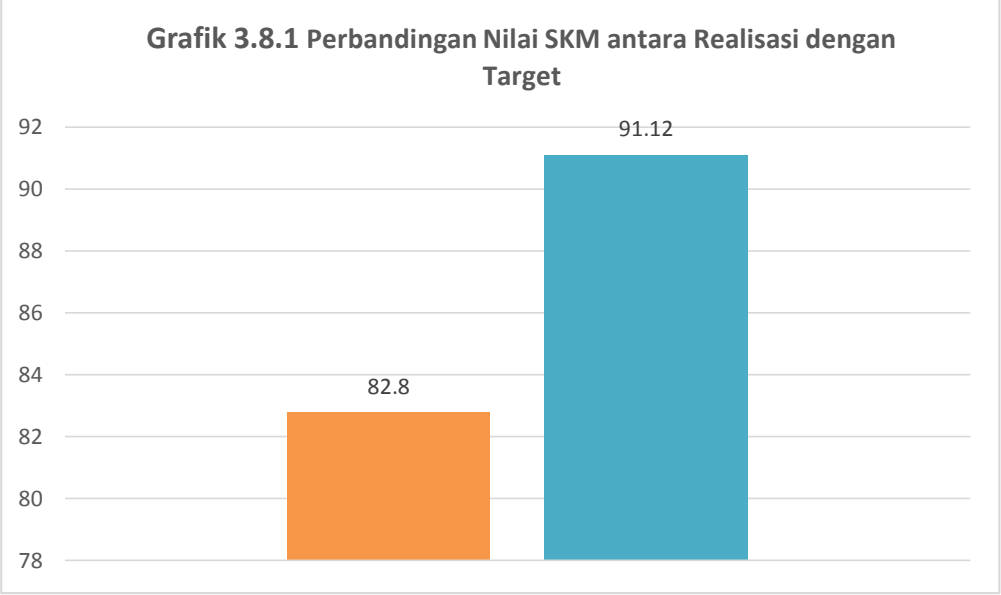
Pengukuran kinerja tahunan/sasaran tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran di tahun 2021, dengan target dari indikator kinerja sasaran di tahun 2021, sebagaimana pada Renstra.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahunan

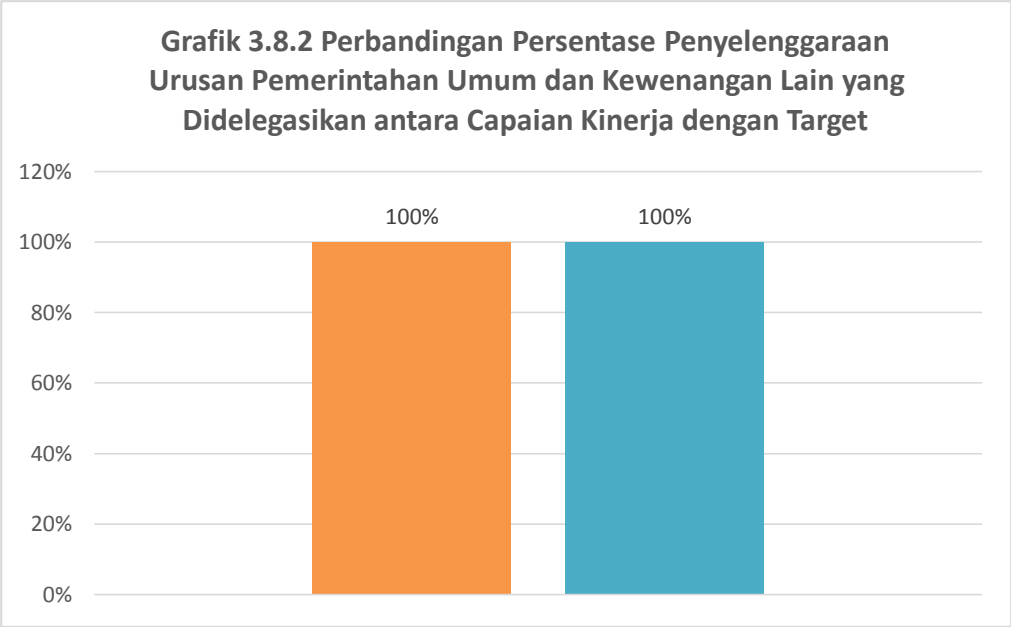
No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	82.80	91.12	110,05
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%
		2.Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	90%	86,67%	96,3%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Tahun 2021 bahwa Sasaran 1 Kecamatan Buduran yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan indikator Nilai SKM Kecamatan, Target tahun 2021 adalah 82,80, pada tahun 2021 Realisasi Nilai SKM Kecamatan Buduran 91,12, maka capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 110,05%.

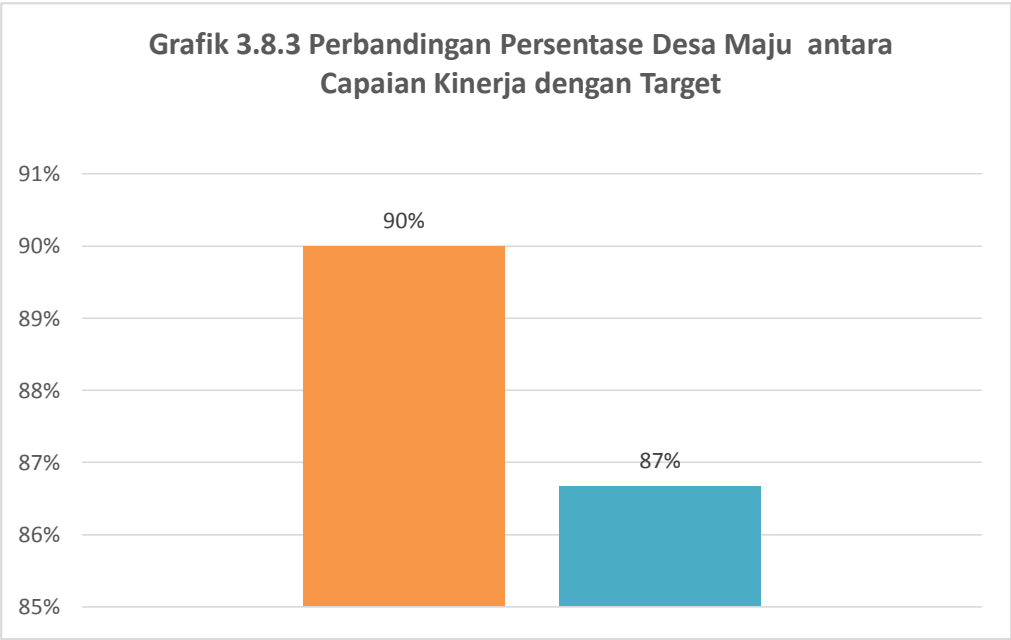
Sasaran 2 Kecamatan Buduran yaitu : Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator 1 : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik, Target 100%, Realisasi 100%, maka capaian kinerja 100%. Indikator 2 : Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran, Target 90%, Realisasi 86,67%, maka capaian kinerja 96,30%.



d. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan



i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

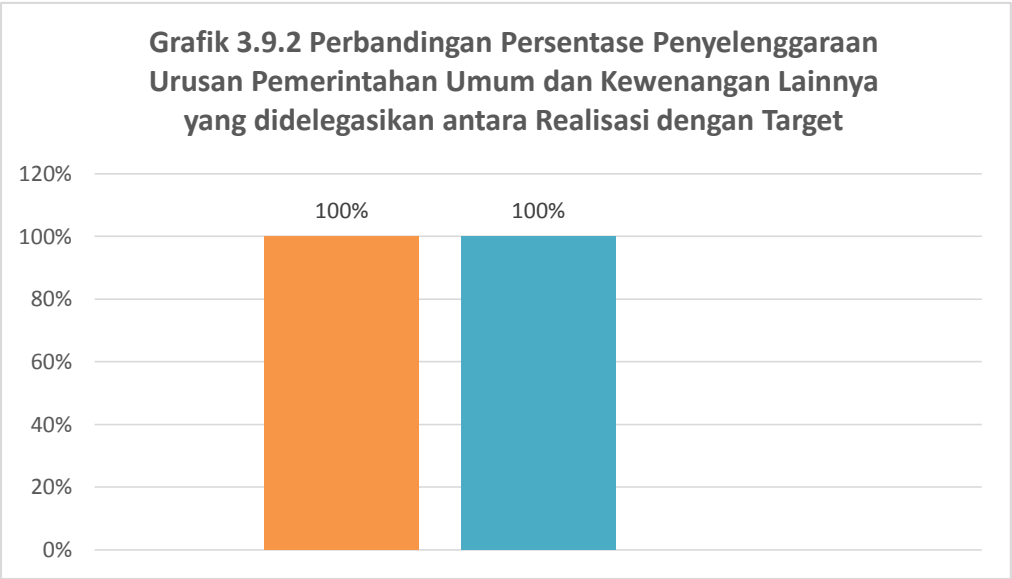
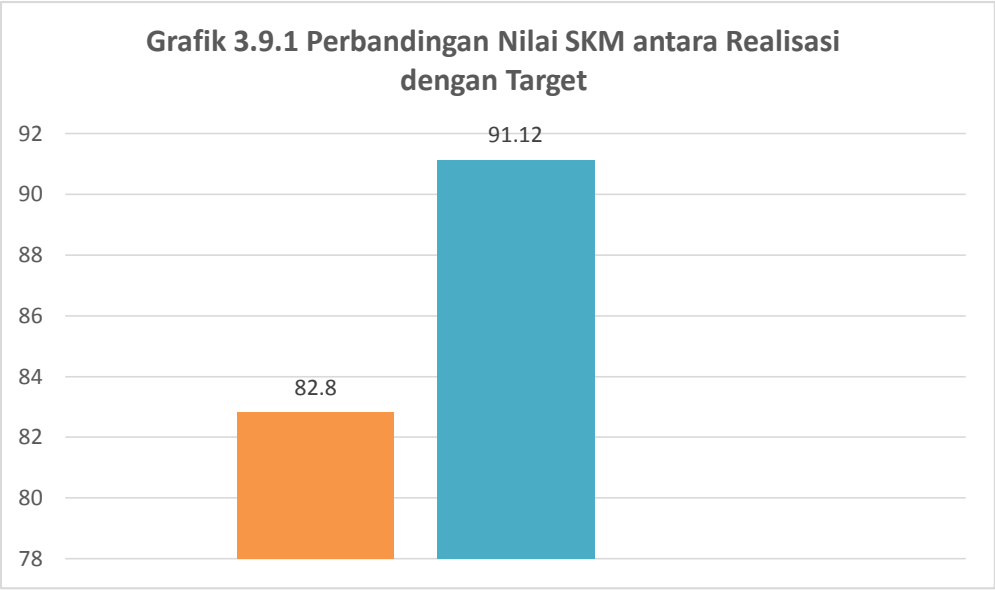


Setelah dilakukan pengukuran kinerja tahunan, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian kinerja, yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja kecamatan Buduran, dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi pada Tahun yang sama yaitu tahun 2021.

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian 2021 (%)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	82.80	91.12	110,05
2	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%
	2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	0,900	0,8667	0,9630

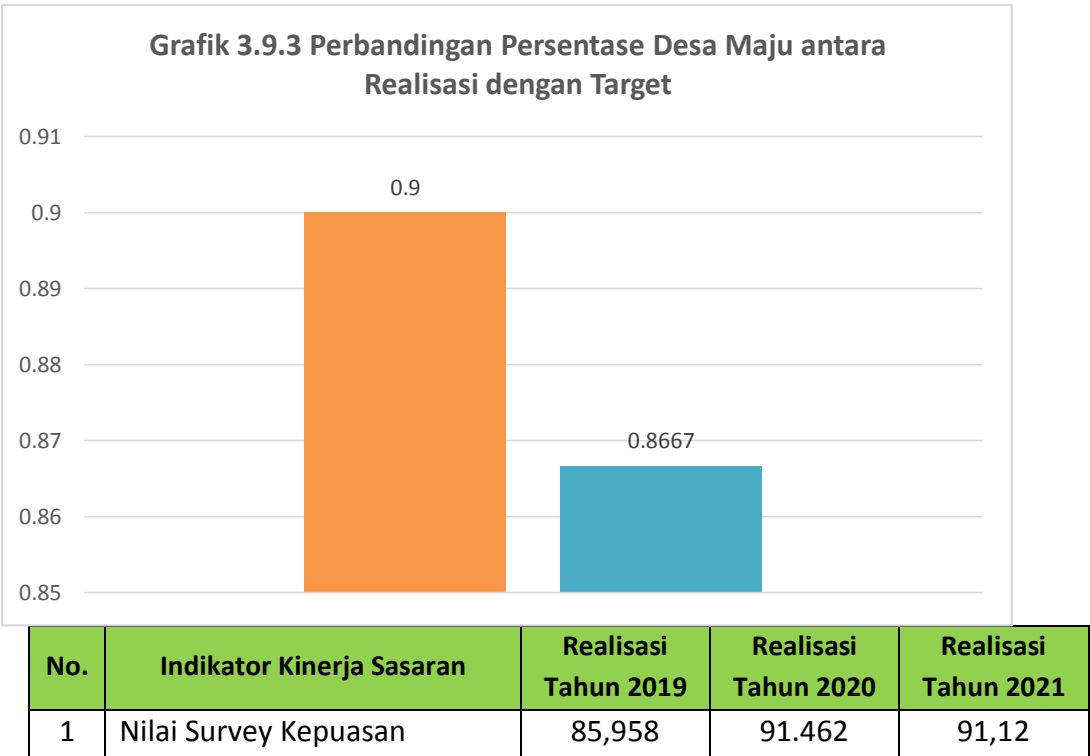
Berdasarkan tabel diatas dan grafik tersebut dibawah ini, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SKM telah mencapai 110,05% melebihi dari target. Capaian Kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik telah mencapai 100%. Sedang Capaian Kinerja Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran hanya mencapai 96,30%.



ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

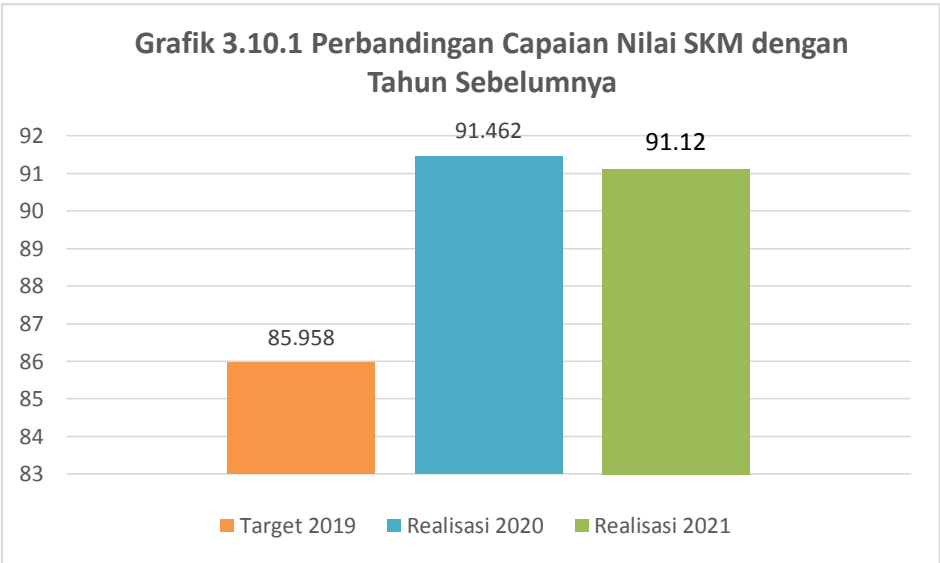
Setelah dilakukan pengukuran kinerja tahunan, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian kinerja, yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja kecamatan Buduran tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

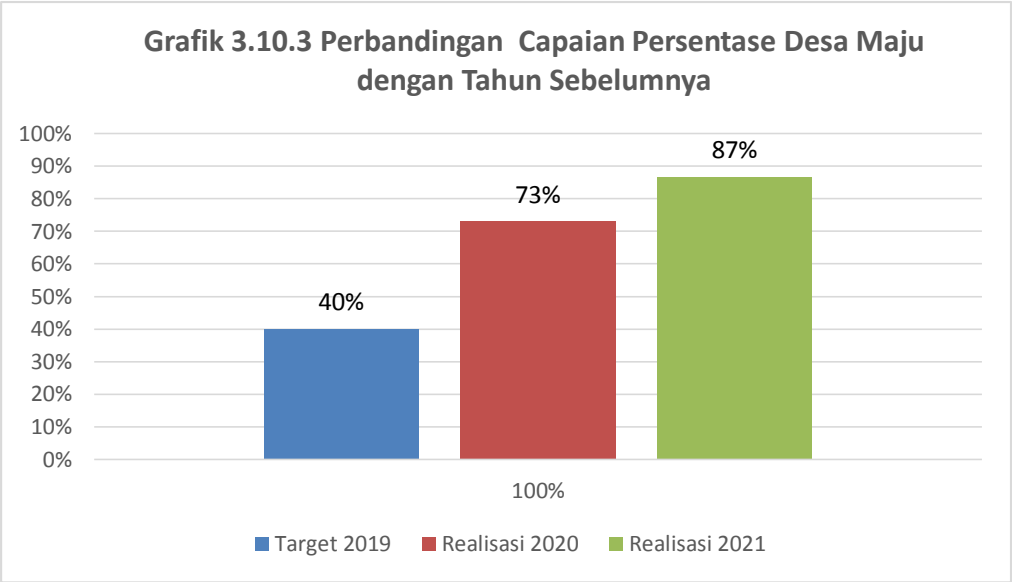
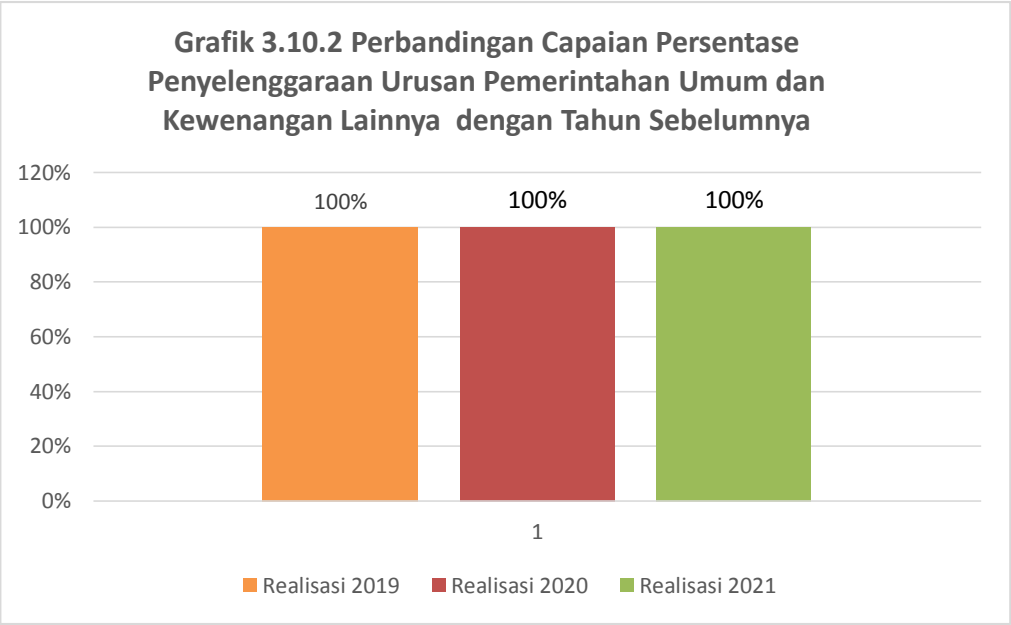
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021



	Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			
2	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%
	2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	40%	73%	86,67%

Berdasarkan tabel diatas dan grafik tersebut dibawah, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SKM pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2019, dengan kenaikan sebesar 91,462, menurun dari tahun 2020, dengan penurunan sebesar 91,12%. Capaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan pada tahun 2021 sama dari tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 100%. Capaian kinerja Persentase Desa Maju pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2019, dengan kenaikan sebesar 73%, meningkat dari tahun 2020 sebesar 86,67%.

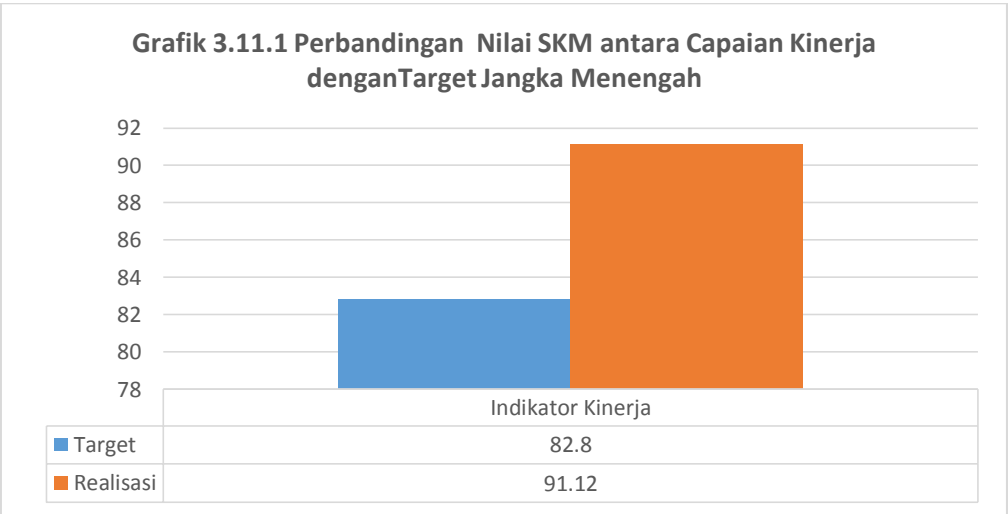


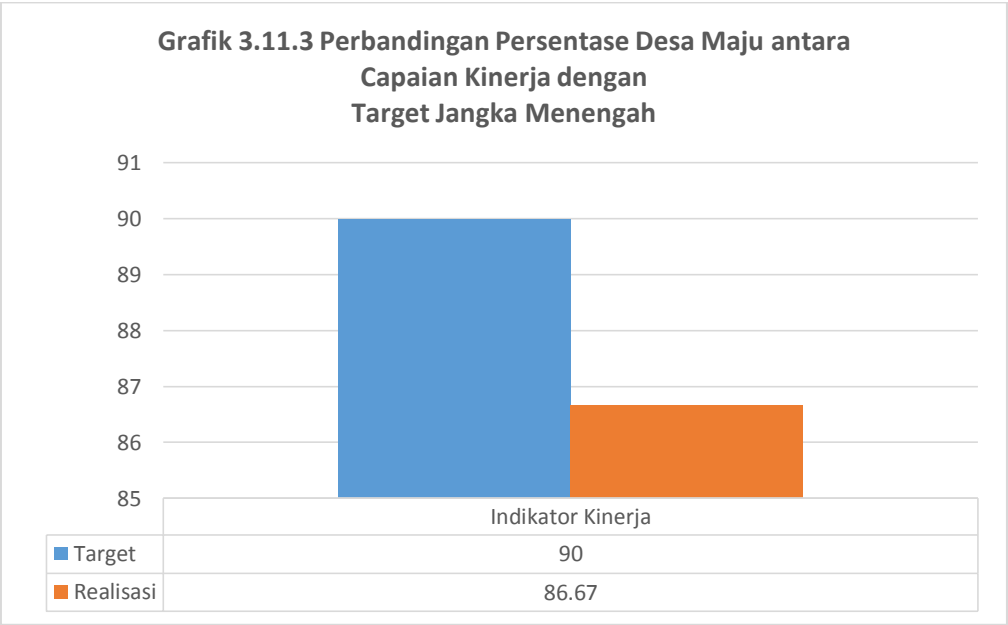
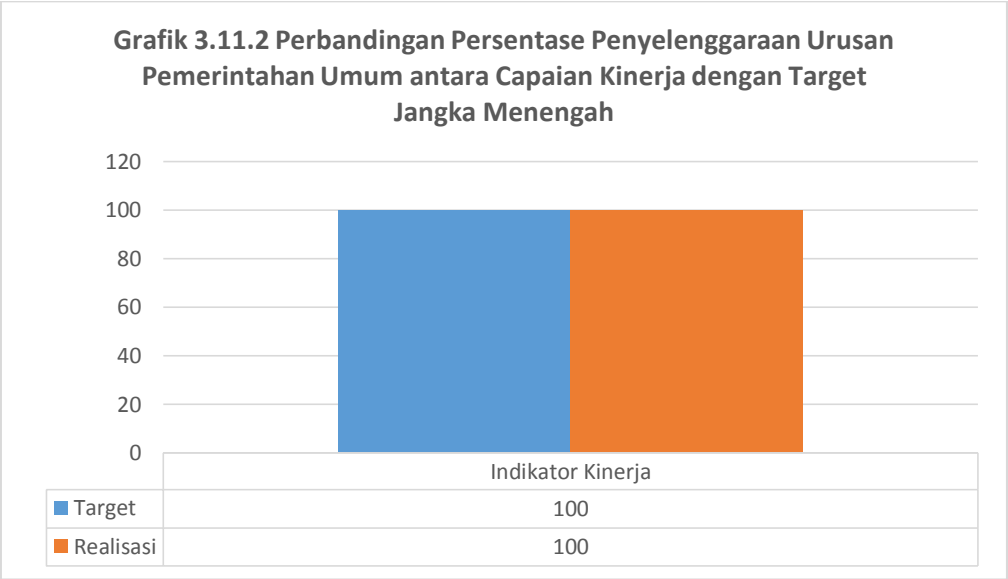


iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	91,12	82.80	110,05
2	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%
	2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	86,67%	90%	96,30%





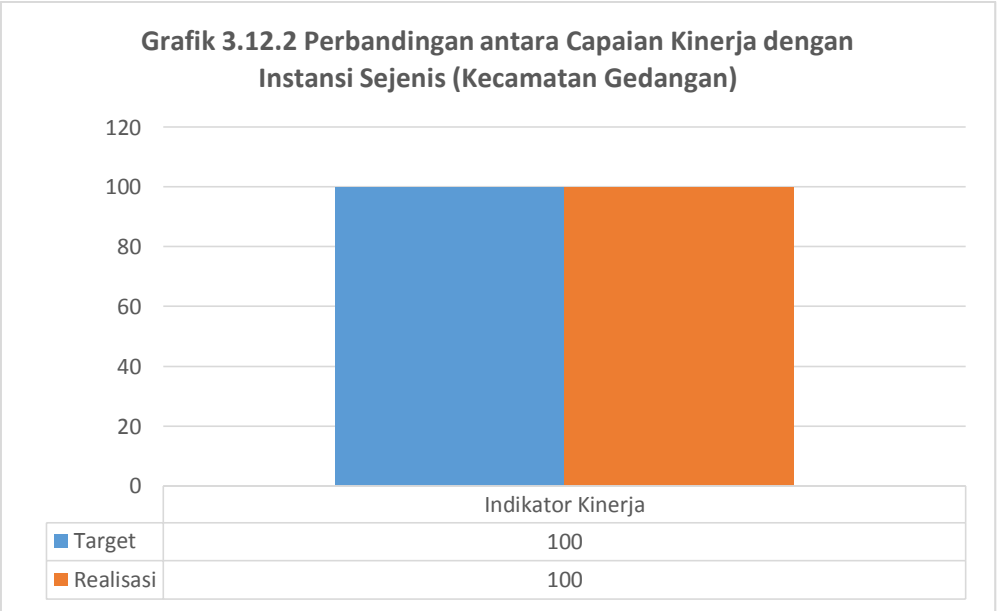
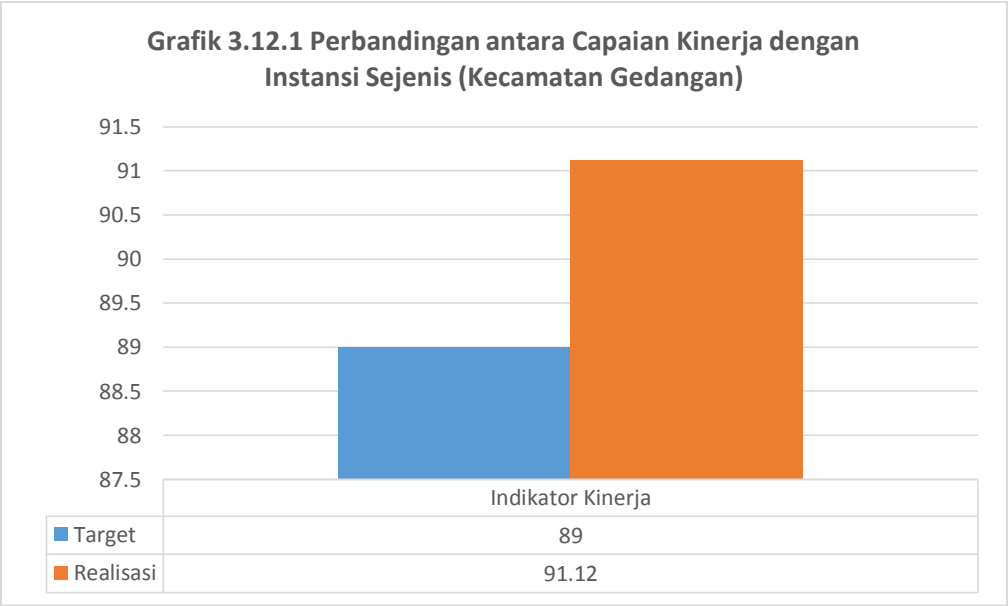
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SKM telah mencapai 110,05% dari target jangka menengah. Bahwa capaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik telah mencapai 100% dari target jangka menengah. Bahwa capaian kinerja Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran 96,30%.

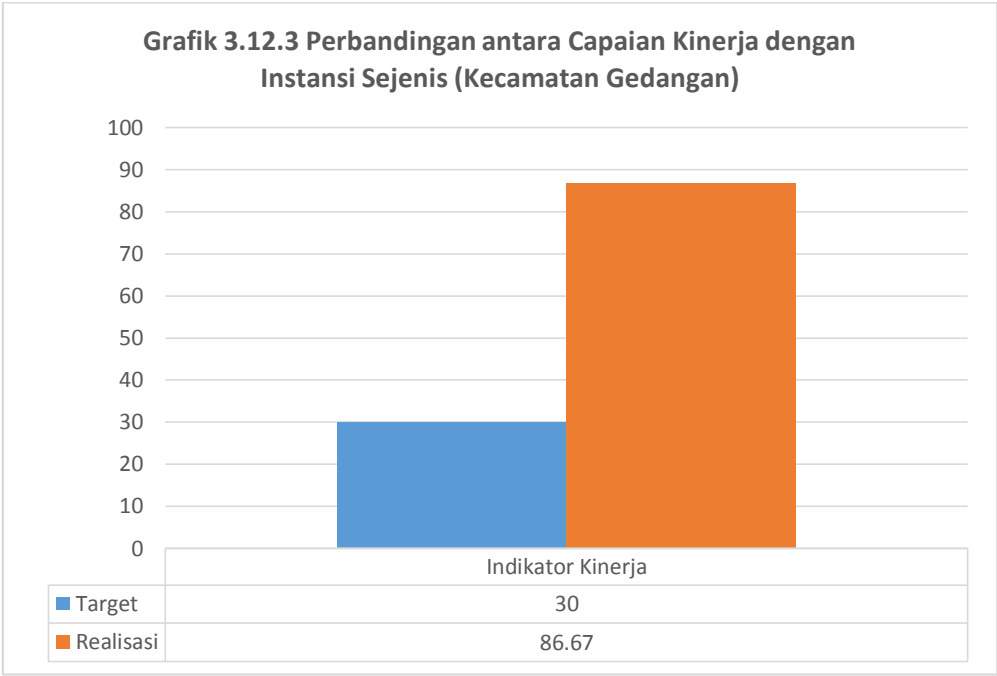
iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kecamatan Gedangan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Instansi Sejenis	Capaian (%)
1	Nilai Survey Kepuasan	91,12	89	102,38

	Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			
	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%
	2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	86,67%	30%	288,9%





Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai SKM apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari instansi sejenis dalam hal ini **Kecamatan Gedangan**, maka capaian kinerja **lebih baik**.

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari instansi sejenis, dalam hal ini Kecamatan Gedangan, maka capaian kinerja adalah **sama**.

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Persentase Desa Maju apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari Instansi sejenis dalam hal ini Kecamatan Gedangan, maka capaian kinerja **lebih baik**.

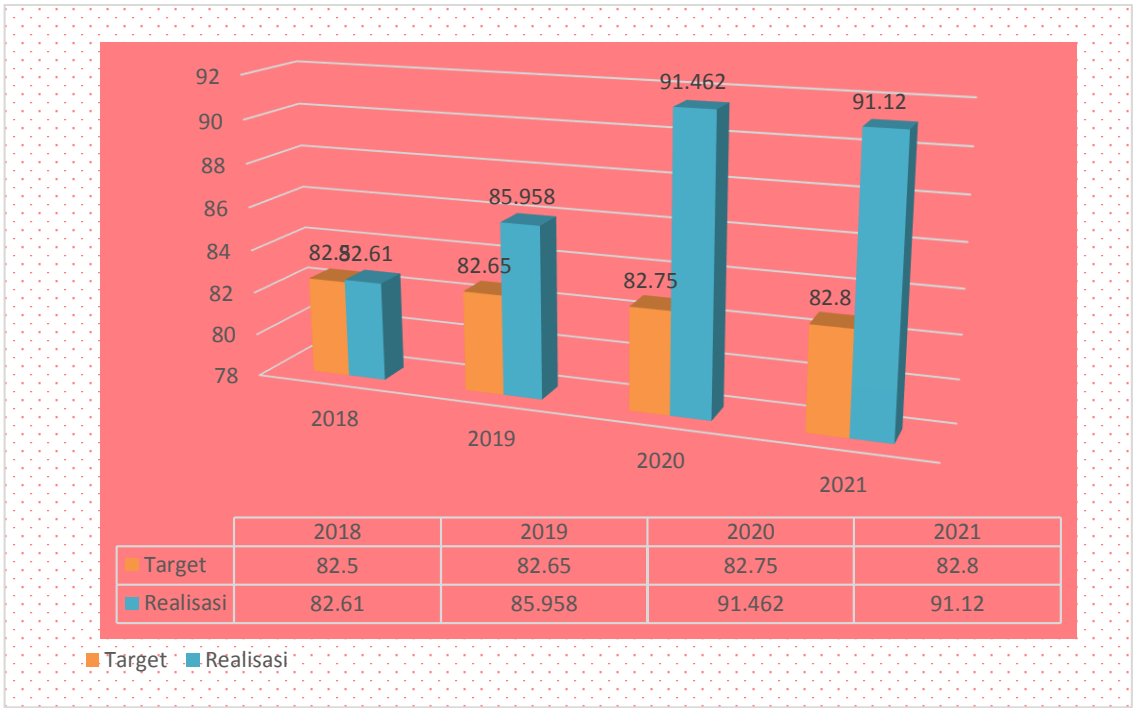
Perkembangan (Tren) Capaian Kinerja

Membandingkan/mengukur Capaian Kinerja di tahun 2021 dengan Capaian Kinerja tahun-tahun sebelumnya (tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021).

Tabel 3.13 Perkembangan Capaian Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Buduran Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

Survey Kepuasan Masyarakat								
Target Tahun 2021	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
82,80	82,50	82,61	82,65	85,958	82,75	91.462	82,80	91,12

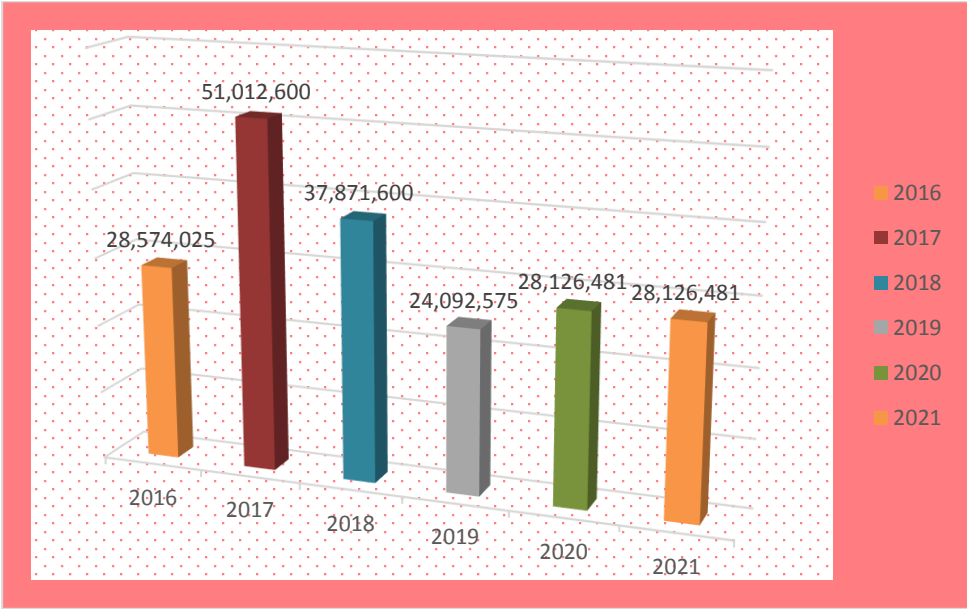
Grafik 3.13 Perkembangan Capaian Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Buduran Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021



Tabel 3.14 Perkembangan Pelayanan IMB Kecamatan Buduran Tahun 2016-2021

URAIAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pelayanan IMB Rumah Tinggal Dibawah 400 M²	65 rmh (Rp. 28.547.025)	114 rmh (Rp. 51.012.600)	86 rmh (Rp. 37.871.600)	47 rmh (Rp. 24.092.575)	58 rmh (Rp. 28.126.481)	52 rmh (Rp. 31.185.119)

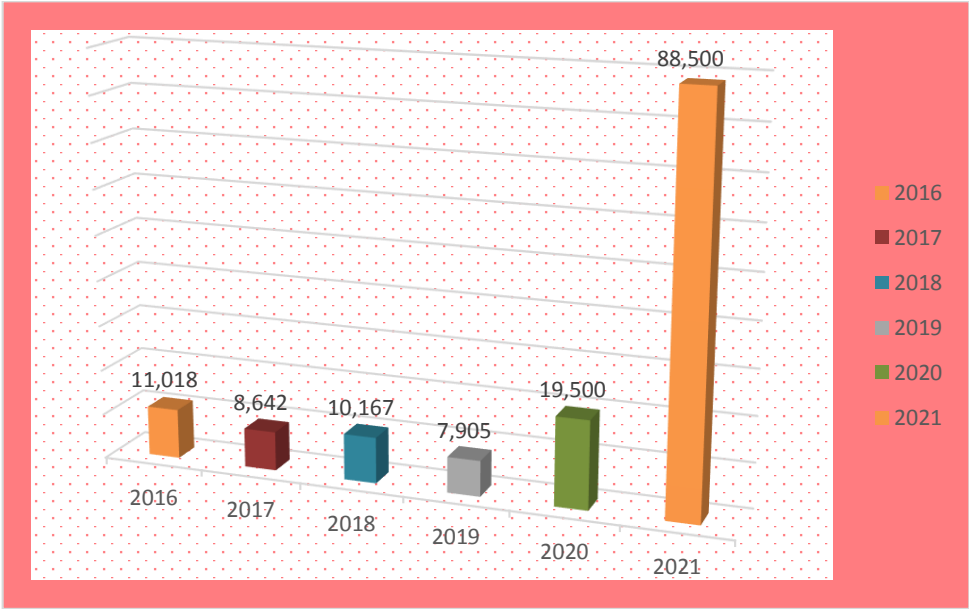
Grafik 3.14 Perkembangan Pelayanan IMB Rumah Tinggal Dibawah 400 M² Kecamatan Buduran Tahun 2016-2021



Tabel 3.15 Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Kecamatan Buduran

URAIAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)	11.018 Org	8.642 Org	10.167 Org	7.905 Org	19.500 Org	88.500 Org

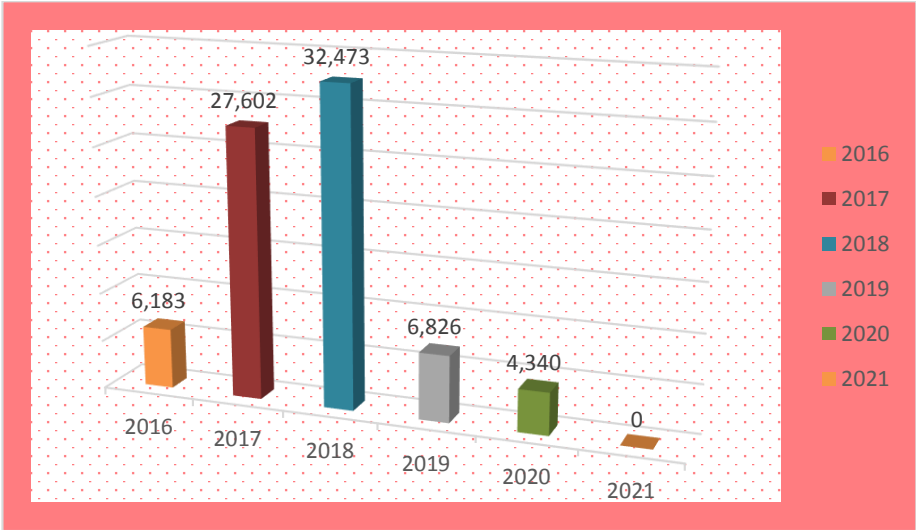
Grafik 3.15 Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Kecamatan Buduran



Tabel 3.16 Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Keluarga (KK)
Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Kecamatan Buduran

URAIAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk yang Mengurus Kartu Keluarga (KK)	6.183 Org	27.602 Org	32.473 Org	6.826 Org	4.340 Org	Org

**Grafik 3.16 Jumlah Keluarga yang Mengurus Kartu Keluarga (KK)
Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Kecamatan Buduran**



v. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pencapaian tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi perbandingan hasil capaian kinerja, penjelasan dalam menghadapi permasalahan–permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya–upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Setelah dilakukan evaluasi dan analisa kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target setiap sasaran.

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran capaian kinerja ada yang termasuk kategori **sangat berhasil** dengan capaian sebesar 110,05% (Sasaran 1 dengan Indikator Kinerja Nilai SKM), kategori **berhasil** dengan capaian sebesar 100% (Sasaran 2 dengan Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lain yang didelegasikan) dan kategori **berhasil** dengan capaian sebesar 96,30% (Sasaran 2 dengan Indikator Kinerja Persentase Desa Maju).

Tabel 3.17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Kategori
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	110,05	Sangat Berhasil
2	Sasaran 2 : 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	100%	Berhasil
	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	96,30%	Berhasil

Tabel 3.18 Prosentase Capaian dan Kategori Capaian

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Tidak tercapainya target persentase desa maju diakibatkan karena kesalahan teknis pada saat pengisian kuesioner IDM. Kalau dilihat secara nyata di lapangan bahwa semua kriteria desa maju sudah ada pada desa-desa di Kecamatan Buduran, namun pada saat pengisian kusioner ada beberapa pertanyaan yang tidak diisi, sehingga status desa-desa di kecamatan Buduran masih ada dua desa yang masuk kategori masih berkembang.

Berikut perbandingan data Indeks Desa Membangun dengan tahun dasar tahun 2016 dan pencapaian pada tahun 2021 :

Tabel 3.19 Perbandingan Indeks Desa Membangun Tahun Dasar (2016) dan Pencapaian Tahun 2021

No.	Nama Desa	TAHUN 2016		TAHUN 2021	
		IDM	Status Desa	IDM	Status Desa
1	Banjar Kematren	0.61680	Berkembang	0.6330	BERKEMBANG
2	Banjarsari	0.74250	Maju	0.7152	MAJU
3	Buduran	0.76270	Maju	0.7595	MAJU
4	Damarsi	0.64950	Berkembang	0.7389	MAJU
5	Dukuh Tengah	0.75560	Maju	0.7576	MAJU
6	Ental Sewu	0.73500	Maju	0.7259	MAJU
7	Pagerwojo	0.64800	Berkembang	0.7557	MAJU
8	Prasung	0.67860	Berkembang	0.7154	MAJU
9	Sawohan	0.66250	Berkembang	0.7667	MAJU
10	Sidokepong	0.63900	Berkembang	0.7433	MAJU
11	Sidokerto	0.65020	Berkembang	0.7297	MAJU
12	Sidomulyo	0.73920	Maju	0.7186	MAJU
13	Siwalan Panji	0.73400	Maju	0.7706	MAJU
14	Sukorejo	0.66920	Berkembang	0.7357	MAJU
15	Wadungasih	0.61460	Berkembang	0.6432	BERKEMBANG

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan

- Kendala/permasalahan yang dihadapi :
 1. Kurang optimalnya SDM Aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat ;
 2. Terbatas sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat ;
 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- Upaya yang telah dilakukan :
 1. Mengoptimalkan SDM Aparatur untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat ;
 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan mengajukan anggaran setiap tahunnya.
- Rencana tindak lanjut tahun berikutnya :
 1. Melaksanakan Sosialisasi administrasi kependudukan terhadap SDM Aparatur dalam hal ini perangkat desa dan masyarakat ;
 2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan SIPATEN di Kecamatan Buduran ;

3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk mempermudah masyarakat mengurus/ mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

SASARAN 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Kendala/Permasalahan yang dihadapi :
 1. Belum memadainya kualitas SDM Aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat ;
 2. Kurangnya akurasi data sebagai database perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan ;
 3. Kurangnya pemahaman SDM Aparatur terhadap juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat ;
 4. Rendahnya keamanan sosial dan masih banyaknya pelanggaran ketertiban ;
 5. Adanya perbedaan persepsi antara Bupati beserta Camat maupun Kepala Desa dalam hal pelimpahan kewenangan ;
 6. Kurang optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan program-program ;
 7. Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan program-program ;
 8. Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Upaya yang telah dilakukan :
 1. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik Kecamatan maupun Desa ;
 2. Meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan SDM Aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan program-program ;
 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
- Rencana tindak lanjut tahun berikutnya :
 1. Melaksanakan bimtek perangkat desa ;
 2. Melaksanakan evaluasi APBDes dengan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
 3. Meningkatkan koordinasi dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Trantib, Kessos dan Pembangunan ;
 4. Meningkatkan pembinaan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Trantib, Kessos dan Pembangunan ;
 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Trantib, Kessos dan Pembangunan.

Solusi dan Upaya Perbaikan di Tahun Mendatang

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan–permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya–upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

1. Mempertahankan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan dengan optimalkan SDM Aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,

2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik Kecamatan maupun Desa
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan meningkatkan pembinaan SDM Aparatur dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Uraian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian masing-masing sasaran strategis, beserta penjelasan hasil capaian kinerjanya.

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

SASARAN 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

65

		<p>2. Persentase desa yang menyusun dokumen pemutakhiran data IDM secara valid</p> <p>3. Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan, pnganggaran dan pelaporan</p> <p>4. Persentase PATEN sesuai SP dan SOP</p>				<p>c. Berhasil</p> <p>d. Berhasil</p>
2	<p>PROGRA M KOORDI NASI KETENTR AMAN DAN KETERTIB AN UMUM</p>	<p>1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang trantibum yang ditindaklanjuti</p> <p>2. Prosentase lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yg dibina</p> <p>3. Prosentase temuan pelanggaran perda dan konflik yg ditangani</p>	174.026.044	155.800.000	89,53	<p>a. Cukup</p> <p>b. Cukup</p> <p>c. Cukup</p>
3	<p>PROGRA M PENYELE NGGARA AN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM</p>	<p>Jumlah upacara hari besar yang dilaksanakan</p>	9.761.207	9.734.900	99,73	Berhasil

4	PROGRA M PEMBIN AAN DAN PENGAW ASAN PEMERIN TAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan, pnganggaran dan pelaporan	66.405.159	33.715.000	50,77	Kurang
		TOTAL	5.648.774.748	5.223.304.820	92,47	Berhasil

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Penjelasan : Ada 3 (tiga) program yang masuk kategori Berhasil dan ada 2 (dua) program yang masuk kategori Cukup dan Kurang. Adapun yang capaiannya cukup terjadi karena terkendala waktu PAK (Anggaran Kegiatan mengalami pergeseran pada PAK), sedang yang capaiannya kurang terjadi karena Kegiatan tidak bisa dilaksanakan akibat terkendala Kebijakan dari Pimpinan untuk tidak melaksanakan atau menyerap anggaran.

3.4. Laporan Realisasi Anggaran

Berikut ini adalah Prosentase Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2021 per program dan kegiatan, yang dihitung dengan cara membandingkan Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan dengan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Tahun 2021.

Tabel 3.21 Tabel Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.767.041.422,00	4.431.874.108,00	92,97
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	656.540.916,00	623.365.931,00	94,95
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	174.026.044,00	155.800.000,00	89,53
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN	9.761.207,00	9.734.900,00	99,73

V	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.405.159,00	33.715.000,00	50,77
	JUMLAH TOTAL	5.648.774.748,00	5.223.304.820,00	92,47

Adapun Anggaran Kecamatan Buduran pada Tahun 2021 dialokasikan untuk melaksanakan 2 (dua) Sasaran Strategis Pembangunan, yaitu : Sasaran Strategis 1 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai SKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mencapai prosentase sebesar 84,39% dan Sasaran Strategis 2 adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran mencapai prosentase sebesar 15,61%.

Tabel 3.22 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	4.767.041.422.00	84,39%

SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	840.328.167,00	14,88%
	2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	66.405.159,00	1,18%

3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Berikut ini adalah Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran Strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja beserta Prosentase Capaian Anggaran Kecamatan Buduran pada Tahun 2021.

Tabel 3.23 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	82,80	91,12	110,05	4.767.041.422	4.431.874.108	92,97

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%	840.328.167	757.715.712	90,17
2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	90%	86,67%	96,30%	66.405.159	33.715.000	50,77

3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Effisiensi dan Efektifitas Sumber Daya

Berikut ini adalah Tabel Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya berdasarkan masing-masing Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Kecamatan Buduran pada Tahun 2021.

Tabel 3.24 Tingkat Effisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	110,05%	92,97%	84,48%

Catatan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran

EFISIENSI HANYA DAPAT DIISI KETIKA CAPAIAN KINERJA 100%, JIKA BELUM MENCAPAI 100% MAKA DIANGGAP TIDAK ADA EFISIENSI

SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan dengan Baik	100%	90,17%	90,17%
	2. Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran	96,30%	50,77%	52,72%

2. Analisis atas Effisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk Sasaran Strategis 1 dengan Indikator Kinerja Nilai SKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan Prosentase Capaian Kinerja sebesar 110,05% dengan Penyerapan Anggaran sebesar 92.97%, maka Tingkat Effisiensi adalah sebesar 84,48%.

Untuk Sasaran Strategis 2 dengan Indikator Kinerja 1 Prosentase Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Penyerapan Anggaran sebesar 90,17%, maka Tingkat Effisiensi adalah sebesar 90,17%.

Untuk Sasaran Strategis 2 dengan Indikator Kinerja 2 Prosentase Capaian Kinerja sebesar 96,30% dengan penyerapan anggaran sebesar 50,77% maka Tingkat Efisiensi adalah sebesar 52,72%.

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat dua (2) indikator kinerja yang efektif tercapai 90,17%, yaitu Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan dengan Baik serta

indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan walaupun Capaian Kinerja Tinggi.

Efisiensi tersebut disebabkan oleh Capaian Kinerja yang tinggi dibarengi dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. Sehingga tercapailah Tingkat Efisiensi yang tinggi pula.

Sedangkan satu indikator kinerja Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran tingkat efisiensi rendah. Hal ini disebabkan karena Capain Kinerja tinggi akan tetapi serapan anggaran rendah. Sehingga Tingkat Efisiensi adalah rendah.

BAB IV

PENUTUP / SIMPULAN UMUM

a. Kesimpulan

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buduran Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Buduran telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dapat dilihat dari nilai Capaian Kinerja Indikator Kinerjanya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, diketahui bahwa 1 (satu) indikator sasaran mencapai nilai 110,05% termasuk Kategori Sangat Berhasil atau Baik Sekali, 1 (satu) indikator sasaran mencapai nilai 100% termasuk kategori Berhasil atau Baik Sekali, dan 1 indikator sasaran mencapai nilai 96,30% termasuk kategori Berhasil atau Baik. Jadi rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 102,12% termasuk kategori Sangat Berhasil atau Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 adalah Sangat Berhasil atau Baik Sekali.

b. Saran

Walaupun termasuk kategori Sangat Berhasil atau Baik Sekali akan tetapi masih ada salah satu indikator kinerja sasaran yang serapan anggarannya masih rendah yaitu Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran. Sehingga tingkat efisiensi masih rendah atau tidak efisien. Untuk kedepannya perlu lebih ditingkatkan lagi penyerapan anggaran supaya tingkat efisiensi bisa meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Buduran, dimana masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, akhirnya kami sampaikan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya pada kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kecamatan Buduran.

Buduran, Pebruari 2022
Plt. CAMAT BUDURAN



WAHYU HIDAYAT, S.STP.

Pembina (IV/a)

NIP. 198004201998101001